



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1106, 2022

KEMENKEU. Standar Biaya Keluaran.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151/PMK.02/2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);  
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 2**

- (1) SBK meliputi:
  - a. SBK Umum; dan
  - b. SBK Khusus.
- (2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga yang dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. SBK Perencanaan dan Penganggaran;
  - b. SBK Laporan Kinerja;
  - c. SBK Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. SBK Audit Kinerja;
  - e. SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3);
  - f. SBK Pemantauan dan Evaluasi;
  - g. SBK Penelitian;
  - h. SBK Peraturan Menteri/Lembaga;
  - i. SBK Peraturan Presiden;
  - j. SBK Peraturan Pemerintah;
  - k. SBK Rancangan Undang-Undang;
  - l. SBK Sosialisasi; dan
  - m. SBK Kehumasan dan Informasi.
- (3) SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.

### Pasal 3

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2024; dan/atau
- d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, huruf l, huruf m, dan SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berfungsi sebagai estimasi.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (4) Besaran SBK Umum dan SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dan dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - c. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
- (5) Pelaksanaan ketentuan pelampauan besaran SBK Umum dan SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

### Pasal 5

- (1) Khusus untuk pelaksanaan anggaran penelitian, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*.
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian dan inovasi.

- (3) Pelaksanaan anggaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Pasal 6

- (1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga memprioritaskan dan bertanggungjawab atas penggunaan SBK dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pengawasan atas penggunaan SBK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151 /PMK.02/2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

SBK UMUM

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	<b>Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran</b>			
	a. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk Sotker Eselon I/Settingkat			
	1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Sotker Eselon I tanpa sotker vertikal	1 Dokumen	51.700.000	
	2) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Sotker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 sotker	1 Dokumen	410.300.000	
	3) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Sotker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 sotker	1 Dokumen	758.300.000	
	4) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Sotker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 sotker	1 Dokumen	1.493.100.000	
	5) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Sotker Eselon I dengan unit vertikal di atas 34 sotker	1 Dokumen	1.725.100.000	
	b. SBK Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L)			
	1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu sotker	1 Dokumen	212.000.000	
	2) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	360.100.000	
	3) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	545.100.000	
	4) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian Negara/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	619.100.000	
2	<b>Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)</b>			
	a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Sotker Eselon I/Settingkat			
	1) Layanan Penyusunan LAKIN Sotker Eselon I tanpa sotker vertikal	1 Dokumen	17.300.000	
	2) Layanan Penyusunan LAKIN Sotker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 sotker	1 Dokumen	135.900.000	
	3) Layanan Penyusunan LAKIN Sotker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 sotker	1 Dokumen	252.800.000	
	4) Layanan Penyusunan LAKIN Sotker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 sotker	1 Dokumen	497.800.000	
	5) Layanan Penyusunan LAKIN Sotker Eselon I dengan unit vertikal di atas 34 sotker	1 Dokumen	575.100.000	
	b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L)			
	1) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu sotker	1 Dokumen	70.600.000	
	2) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	120.000.000	
	3) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	181.700.000	
	4) Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	206.300.000	
3	<b>Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan			
	1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 Orang	30.261.000	
	2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	1 Orang	22.125.000	
	3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	1 Orang	20.230.000	
	b. Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan			
	1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	9.296.000	
	2) Layanan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Orang	2.242.000	

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
4	<b>Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja</b>			
a.	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
1)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Aceh	1 LHA	27.300.000	
2)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	25.800.000	
3)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Riau	1 LHA	25.600.000	
4)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	24.900.000	
5)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jambi	1 LHA	21.200.000	
6)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	24.200.000	
7)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	23.700.000	
8)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Lampung	1 LHA	17.700.000	
9)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bengkulu	1 LHA	22.000.000	
10)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	21.300.000	
11)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Banten	1 LHA	15.300.000	
12)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	14.400.000	
13)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	2.700.000	
14)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	19.600.000	
15)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	24.000.000	
16)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	23.900.000	
17)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bali	1 LHA	28.500.000	
18)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	25.400.000	
19)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	29.800.000	
20)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	22.400.000	
21)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	23.700.000	
22)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	23.100.000	
23)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	30.300.000	
24)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	28.200.000	
25)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	31.400.000	
26)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Gorontalo	1 LHA	31.000.000	
27)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	31.500.000	
28)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	27.300.000	
29)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	33.100.000	
30)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	29.000.000	
31)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku	1 LHA	37.100.000	
32)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	34.600.000	
33)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua	1 LHA	48.400.000	
34)	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat	1 LHA	48.500.000	
b.	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota			
1)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Aceh	1 LHA	58.300.000	
2)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera	1 LHA	56.800.000	
3)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Riau	1 LHA	56.500.000	
4)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kepulauan	1 LHA	55.800.000	
5)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jambi	1 LHA	52.200.000	
6)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera	1 LHA	53.200.000	
7)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	54.700.000	
8)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Lampung	1 LHA	48.700.000	
9)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bengkulu	1 LHA	53.000.000	
10)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bangka	1 LHA	52.200.000	
11)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Banten	1 LHA	46.200.000	
12)	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	45.300.000	

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	13) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
	14) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	50.600.000	
	15) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.900.000	
	16) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	54.900.000	
	17) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bali	1 LHA	59.500.000	
	18) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.300.000	
	19) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.800.000	
	20) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	53.300.000	
	21) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	54.600.000	
	22) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	54.100.000	
	23) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	61.300.000	
	24) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	59.200.000	
	25) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	62.400.000	
	26) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Gorontalo	1 LHA	62.000.000	
	27) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	62.500.000	
	28) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi	1 LHA	58.300.000	
	29) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi	1 LHA	64.100.000	
	30) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	60.000.000	
	31) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku	1 LHA	68.000.000	
	32) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	63.500.000	
	33) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua	1 LHA	76.400.000	
	34) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Barat	1 LHA	79.500.000	
c. Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi				
	1) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Aceh	1 LHA	125.800.000	
	2) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	121.000.000	
	3) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Riau	1 LHA	142.700.000	
	4) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	137.200.000	
	5) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jambi	1 LHA	169.400.000	
	6) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	126.300.000	
	7) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	139.900.000	
	8) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Lampung	1 LHA	93.600.000	
	9) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bengkulu	1 LHA	115.700.000	
	10) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	119.500.000	
	11) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Banten	1 LHA	109.800.000	
	12) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat	1 LHA	101.300.000	
	13) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	103.200.000	
	14) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	141.900.000	
	15) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Timur	1 LHA	128.700.000	
	16) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bali	1 LHA	161.600.000	
	17) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	128.200.000	
	18) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.900.000	
	19) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	114.100.000	
	20) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	124.100.000	
	21) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	116.000.000	
	22) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	154.900.000	
	23) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	149.900.000	
	24) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	152.100.000	
	25) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Gorontalo	1 LHA	149.400.000	
	26) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	149.400.000	
	27) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	138.300.000	
	28) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	167.400.000	
	29) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	147.000.000	
	30) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku	1 LHA	157.900.000	
	31) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku	1 LHA	142.700.000	
	32) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua	1 LHA	203.000.000	
	33) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat	1 LHA	187.200.000	

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Boraram	Keterangan
1	2	3	4	5
5	Standar Biaya Keluaran Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)			
	a. Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint			
	1) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	99.050.000	
	2) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	99.050.000	
	3) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	99.050.000	
	4) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	99.050.000	
	5) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	104.135.000	
	6) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	104.135.000	
	7) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	104.135.000	
	8) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	104.135.000	
	9) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	104.135.000	
	10) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Reproduksi-Reprint dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	104.135.000	
	b. Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	265.340.000	
	2) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	360.840.000	
	3) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	528.880.000	
	4) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	625.780.000	
	5) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	735.550.000	
	6) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	850.670.000	
	7) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.012.590.000	
	8) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.112.790.000	
	9) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.285.430.000	
	10) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.385.630.000	
	c. Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri			
	1) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SNI	385.825.000	
	2) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SNI	488.295.000	
	3) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SNI	649.235.000	
	4) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SNI	753.435.000	
	5) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SNI	841.935.000	
	6) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SNI	958.625.000	
	7) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 211 s.d 250	1 SNI	1.100.275.000	
	8) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SNI	1.194.260.000	
	9) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SNI	1.344.230.000	
	10) Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SNI	1.432.790.000	

4.1

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	d. Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan			
	1) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 1 s.d 30	1 SM	390.340.000	
	2) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 31 s.d 60	1 SM	485.840.000	
	3) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 61 s.d 90	1 SM	653.880.000	
	4) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 91 s.d 130	1 SM	751.780.000	
	5) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 131 s.d 170	1 SM	860.550.000	
	6) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 171 s.d 210	1 SM	975.670.000	
	7) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 211 s.d 230	1 SM	1.137.590.000	
	8) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 251 s.d 300	1 SM	1.237.790.000	
	9) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 301 s.d 350	1 SM	1.410.430.000	
	10) Dokumen RSM3 yang Disusun dengan Adepsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan jumlah halaman 351 s.d 400	1 SM	1.510.630.000	
6	<b>Standar Biaya Keluaran Pemantauan dan Evaluasi</b>			
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	240.000.000	
7	<b>Standar Biaya Keluaran Penelitian</b>			
	a. Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000	
	b. Laporan Riset Dasar			
	1) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	151.320.000	
	2) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Laporan	135.670.000	
	3) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	307.000.000	
	4) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	168.400.000	
	5) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	90.000.000	
	6) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)	1 Laporan	235.000.000	
	7) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	179.960.000	
	8) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.000.000	
	9) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	123.800.000	
	10) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	1 Laporan	120.000.000	
	11) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri	1 Laporan	230.000.000	
	12) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	13) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	480.000.000	
	14) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri	1 Laporan	665.000.000	
	15) Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	16) Laporan Riset Dasar Teoritis	1 Laporan	40.546.200	
	c. Laporan Riset Terapan			
	1) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	216.000.000	
	2) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	221.900.000	
	3) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	448.600.000	
	4) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	143.200.000	
	5) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	208.400.000	
	6) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	400.200.000	
	7) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	370.800.000	
	8) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	209.000.000	
	9) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	327.500.000	
	10) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	1 Laporan	150.000.000	
	11) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri	1 Laporan	165.000.000	
	12) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	290.000.000	
	13) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri	1 Laporan	480.000.000	
	14) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri	1 Laporan	665.000.000	

2.1



(dalam rupiah)				
No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	15) Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	640.000.000	
	d. Laporan Riset Pengembangan			
	1) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	568.100.000	
	2) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT	1 Laporan	1.124.800.000	
	3) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.048.100.000	
	4) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	349.600.000	
	5) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK	1 Laporan	402.500.000	
	6) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	559.600.000	
	7) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	724.038.000	
	8) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Komaritimasi	1 Laporan	301.500.000	
	9) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.083.700.000	
	10) Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	515.000.000	
	e. Laporan Kajian Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	25.000.000	
8	Standar Biaya Kelembagaan Peraturan Menteri/Lembaga			
	a. Peraturan Menteri/Lembaga yang Bersifat Internal	1 Peraturan	100.000.000	
	b. Peraturan Menteri/Lembaga yang Bersifat Eksternal	1 Peraturan	200.000.000	
9	Standar Biaya Kelembagaan Peraturan Presiden			
	a. Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana	1 Peraturan Presiden	220.000.000	
	b. Peraturan Presiden yang Bersifat kompleks	1 Peraturan Presiden	440.000.000	
10	Standar Biaya Kelembagaan Peraturan Pemerintah			
	a. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana	1 Peraturan Pemerintah	260.000.000	
	b. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks	1 Peraturan Pemerintah	520.000.000	
	Standar Biaya Kelembagaan Rancangan Undang-Undang			
11	a. Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana	1 Undang-Undang	600.000.000	
	b. Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks	1 Undang-Undang	945.000.000	
12	Standar Biaya Kelembagaan Sosialisasi			
	a. Layanan Sosialisasi Berskala Kecil	1 Laporan	67.500.000	
	b. Layanan Sosialisasi Berskala Sedang	1 Laporan	135.000.000	
	c. Layanan Sosialisasi Berskala Besar	1 Laporan	305.000.000	
13	Standar Biaya Kelembagaan Kehumasan dan Informasi			
	Layanan Kehumasan dan Informasi	1 Layanan	458.000.000	



PENJELASAN SBK UMUM	
1.	<p><b>Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran</b></p> <p>SBK Perencanaan dan Penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk satker eselon I/setingkat</p> <p>SBK Layanan Penyusunan RKA untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Penyusunan RKA yang digunakan oleh satker unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.</p> <p>b. SBK Layanan Penyusunan RKA untuk K/L</p> <p>SBK Layanan Penyusunan RKA untuk K/L merupakan SBK Layanan Penyusunan RKA yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.</p>
2.	<p><b>Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)</b></p> <p>SBK Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.</p> <p>Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk satker eselon I/setingkat</p> <p>SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK Layanan Penyusunan LAKIN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.</p>

1.1

Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut.

b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L

SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L merupakan SBK Layanan Penyusunan LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

3. Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan

SBK Pendidikan dan Pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa peserta yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama, Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*;
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*.

*AL*

- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

#### 4. Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja

SBK Audit Kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Inter Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan keluaran audit kinerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama

SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satker APIP.

- b. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota

SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satker APIP.

- c. SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi

SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi merupakan SBK Layanan Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berbeda provinsi dengan lokasi satker APIP.

#### 5. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)

SBK Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa dokumen RSNi yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat K/L.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

66

- a. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi- *reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- b. RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.
- d. RSNI3 yang disusun dengan adopsi modifikasi metode terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir berupa jumlah halaman dokumen RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

6. Standar Biaya Keluaran Pemantauan dan Evaluasi

SBK Pemantauan dan Evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas kebijakan strategis, meliputi penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, penyusunan laporan dan rekomendasi melalui kegiatan visitasi lapangan.

7. Standar Biaya Keluaran Penelitian

- a. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas SBK  
Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.

6/1

Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- 1) Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 2) Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Dasar

SBK Laporan Riset Dasar merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Penggunaan SBK Laporan Riset Dasar mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan

44



(konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan).

2) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

3) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

4) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

5) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan,

66

manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

- 6) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.

- 7) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

- 8) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

- 9) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- 10) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

61



SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.

- 11) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

- 12) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.

- 13) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan),

64

*participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- 14) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)  
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.
- 15) SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, konsep, atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.
- 16) SBK Laporan Riset Dasar Teoritis  
SBK Laporan Riset Dasar Teoritis merupakan kelompok yang melingkup riset-riset dibidang keilmuan dasar yang tidak ada dalam kelompok bidang fokus 10 (sepuluh) lainnya, diantaranya matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, statistika dan lainnya. Riset ini ditujukan untuk mencari ilmu pengetahuan baru, pencarian yang bersistem untuk menemukan hal yang belum diketahui, yang belum dapat ditentukan implementasinya. Penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran

dari penelitian ini merupakan dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian teoritis dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung bidang fokus lainnya. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

c. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Terapan

SBK Laporan Riset Terapan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Terapan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

*K J*

- 2) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.
- 3) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu mencegalkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- 4) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- 5) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

61.

- 6) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pertahanan Keamanan (Hankam)  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.
- 7) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif pendukung industri.
- 8) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- 9) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 10) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri  
SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri merupakan

Rh



SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.

- 11) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.

- 12) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian

6.1

bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 (lima) lokasi di dalam negeri.

- 13) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- 14) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 (sepuluh) lokasi di dalam negeri.

- 15) SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri

SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri

A.J.



merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

d. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pengembangan

SBK Laporan Riset Pengembangan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

1) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan suboptimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi,

K I

diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- 2) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi Baru Terbarukan (EBT)

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus EBT merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya merupakan pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

- 3) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu mengakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

- 4) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

- 5) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke

*Handwritten signature*

lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antarmedia.

- 6) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pertahanan dan Keamanan (Hankam)  
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang Hankam.
- 7) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju  
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun nonlogam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- 8) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman  
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan.
- 9) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan  
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan/atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

43

10) SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan  
SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan merupakan SBK Laporan Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

e. Standar Biaya Keluaran Laporan Aktual Strategis

SBK Laporan Kajian Aktual Strategis merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Catatan Umum:

1. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, TIK, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
2. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial, Humaniora,

11.

Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. buku nasional;
  - f. buku internasional;
  - g. naskah kebijakan;
  - h. artikel populer di media cetak;
  - i. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks; dan/atau
  - l. karya seni (tari, patung, lukisan, puisi, musik).
3. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru;
  - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - p. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau





- q. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
- 4. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional; dan/atau
  - l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks.
- 5. Terhadap SBK Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan;
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru; dan/atau
  - o. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional.

A.I.

6. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - r. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
  - t. paten sederhana terdaftar;
  - u. merek dagang terdaftar;
  - v. desain industri terdaftar;
  - w. rahasia dagang terdaftar;
  - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - z. indikasi geografis terdaftar.
7. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;

K.1



- b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kchati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, breeding;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - r. jenis kchati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - s. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;
  - t. paten sederhana terdaftar;
  - u. merek dagang terdaftar;
  - v. desain industri terdaftar;
  - w. rahasia dagang terdaftar;
  - x. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - y. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - z. indikasi geografis terdaftar.
8. Terhadap SBK Laporan Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;

66

- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - s. jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
  - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
  - v. prototipe laik *preklinis*;
  - w. herbal terstandar;
  - x. paten sederhana terdaftar;
  - y. merek dagang terdaftar;
  - z. desain industri terdaftar;
  - aa. rahasia dagang terdaftar;
  - bb. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - cc. perlindungan varietas tanaman terdaftar;
  - dd. indikasi geografis terdaftar; dan/atau
  - ee. fitofarmaka.
9. Terhadap SBK Laporan Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;

AL

- c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. taman tematik, kebun, koleksi;
  - k. paten sederhana terdaftar;
  - l. merek dagang terdaftar;
  - m. desain industri terdaftar;
  - n. rahasia dagang terdaftar;
  - o. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - p. perlindungan varietas tanaman terdaftar; dan/atau
  - q. indikasi geografis terdaftar.
10. Terhadap SBK Laporan Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal Internasional bereputasi;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten terdaftar;
  - h. paten *granted*;
  - i. paten terpakai di industri;
  - j. taman tematik, kebun, koleksi;
  - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
  - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*;
  - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*;
  - n. paten sederhana terdaftar;
  - o. merek dagang terdaftar;
  - p. desain industri terdaftar;
  - q. rahasia dagang terdaftar;
  - r. desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar;
  - s. perlindungan varietas tanaman terdaftar;

*K.I.*

t. indikasi geografis terdaftar; dan/atau		
u. fitofarmaka.		
11. Besaran tambahan biaya SBK Laporan Riset Dasar, SBK Laporan Riset Terapan, dan SBK Laporan Riset Pengembangan sebagai berikut:		
(dalam rupiah)		
No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal internasional	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi	50.000.000
5	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional	2.000.000
6	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional	5.000.000
7	Publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	10.000.000
8	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
9	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
10	Paten terdaftar	75.000.000
11	Paten <i>granted</i>	80.000.000
12	Paten terpakai di industri	90.000.000
13	Paten Sederhana terdaftar	25.000.000
14	Merek Dagang terdaftar	75.000.000
15	Desain Industri terdaftar	75.000.000
16	Rahasia Dagang terdaftar	75.000.000
17	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar	75.000.000
18	Perlindungan Varietas Tanaman terdaftar	75.000.000
19	Indikasi geografis terdaftar	75.000.000
20	Buku nasional	30.000.000
21	Buku internasional	65.000.000

hls

No	Uraian	Besaran
22	Karya Seni (Tari, Patung, Lukisan, Puisi, Musik)	50.000.000
23	Naskah kebijakan	25.000.000
24	Artikel populer di media cetak	2.000.000
25	Material untuk produk biologi	50.000.000
26	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
27	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
28	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
29	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
30	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
31	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
32	Temuan senyawa/ <i>sequence</i> DNA penambahan	100.000.000
33	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
34	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
35	Galur perbaikan	150.000.000
36	PVT/Varietas terdaftar	1.000.000.000
37	PVT/Varietas terdaftar ornamental	100.000.000
38	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
39	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
40	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
41	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
42	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000

*As*

No	Uraian	Besaran
43	Jenis kehati sebagai bioindikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
44	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood produk</i> , atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
45	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
46	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
47	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> ;	1.000.000.000
48	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> ;	6.000.000.000
49	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> .	10.000.000.000
50	Herbal terstandar	200.000.000
51	Fitofarmaka	200.000.000
52	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

a. Ketersediaan alokasi anggaran;

b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Al.



8. Standar Biaya Keluaran Peraturan Menteri/Lembaga

SBK Peraturan Menteri/Lembaga merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Menteri/Lembaga yang dihasilkan dari tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Menteri/Lembaga yang Bersifat Internal

SBK Peraturan Menteri/Lembaga yang Bersifat Internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian/lembaga berkenaan.

b. SBK Peraturan Menteri/Lembaga yang Bersifat Eksternal

SBK Peraturan Menteri/Lembaga yang Bersifat Eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian/lembaga berkenaan.

9. Standar Biaya Keluaran Peraturan Presiden

SBK Peraturan Presiden merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Presiden yang dihasilkan dari tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, sampai dengan diundangkannya Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Instansi.

b. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Instansi.

*A/*

**10. Standar Biaya Keluaran Peraturan Pemerintah**

SBK Peraturan Pemerintah merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Pemerintah yang dihasilkan dari tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, sampai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Instansi.

b. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Instansi.

**11. Standar Biaya Keluaran Rancangan Undang-Undang**

SBK Rancangan Undang-Undang merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan dari tahapan perencanaan sampai dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana

SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Instansi.

b. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks

SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Rancangan

Al

Undang-Undang yang jumlah pasalnya lebih dari 50 (lima puluh) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga/Instansi.

12. Standar Biaya Keluaran Sosialisasi

SBK Sosialisasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan/menyebarluaskan informasi kepada pihak terkait yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penyusunan laporan sosialisasi dan/atau diseminasi.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh pejabat eselon I/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 150 (seratus lima puluh) orang.

b. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh pejabat eselon I/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 400 (empat ratus) orang.

c. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar

SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi yang dihadiri oleh Menteri/setara ke atas dengan jumlah peserta minimal 500 (lima ratus) orang.

13. Standar Biaya Keluaran Kehumasan dan Informasi

SBK Kehumasan dan Informasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi kebijakan kementerian/lembaga yang dilakukan dalam rangka kegiatan komunikasi publik/siaran pers.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

*Adi*

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151 /PMK.02/2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

SBK KHUSUS

Kementerian Negara/Lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat (001)			(dalam rupiah)	
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
001.02	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasayarakatan Konstitusi			
	Forum			
	1 Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD	1 Forum	171.790.000	

Kemendagri Negara/Lembaga: Badan Penyelenggara Ketenangan (BPK)		dalam rupiah		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Berapa	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	Badan Penyelenggara Ketenangan			
	Pemeriksaan Ketenangan Negara			
1	LHP AKH I	1 Laporan	5.107.089.000	
2	LHP AKH II	1 Laporan	5.224.544.000	
3	LHP AKH III	1 Laporan	2.856.673.000	
4	LHP AKH IV	1 Laporan	4.706.969.000	
5	LHP AKH V	1 Laporan	3.692.585.000	
6	LHP AKH VI	1 Laporan	3.582.541.000	
7	LHP AKH VII	1 Laporan	2.856.673.000	
8	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 Laporan	452.750.000	
9	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	430.942.000	
10	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 Laporan	530.541.000	
11	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	403.715.000	
12	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 Laporan	372.044.000	
13	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	434.729.000	
14	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	484.594.000	
15	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 Laporan	302.285.000	
16	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 Laporan	302.069.000	
17	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	401.721.000	
18	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 Laporan	436.128.000	
19	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	532.611.000	
20	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	4.518.291.000	
21	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	477.510.000	
22	LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Laporan	403.340.000	
23	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	574.446.000	
24	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 Laporan	520.686.000	
25	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	458.375.000	
26	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	399.199.000	
27	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	397.283.000	
28	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	392.912.000	
29	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	395.429.000	
30	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	553.482.000	
31	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	439.873.000	
32	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 Laporan	467.721.000	
33	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	406.693.000	
34	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	416.376.000	
35	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	446.456.000	
36	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	407.456.000	
37	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 Laporan	410.410.000	
38	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	401.819.000	
39	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 Laporan	758.693.000	
40	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 Laporan	821.156.000	
41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	469.422.000	
42	LHP LKPP	1 Laporan	10.918.729.000	
43	LHP Interim/Pendahuluan AEN I	1 Laporan	2.397.451.000	
44	LHP Interim/Pendahuluan AEN II	1 Laporan	2.397.255.000	
45	LHP Interim/Pendahuluan AEN III	1 Laporan	546.378.000	
46	LHP Interim/Pendahuluan AEN IV	1 Laporan	2.101.290.000	
47	LHP Interim/Pendahuluan AEN V	1 Laporan	1.431.813.000	
48	LHP Interim/Pendahuluan AEN VI	1 Laporan	1.392.652.000	
49	LHP Interim/Pendahuluan AEN VII	1 Laporan	546.378.000	
50	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 Laporan	371.498.000	
51	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	261.199.000	
52	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 Laporan	449.371.000	
53	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	326.954.000	
54	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 Laporan	391.399.000	
55	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	374.574.000	
56	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	401.573.000	
57	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 Laporan	288.357.000	
58	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 Laporan	308.292.000	
59	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	316.301.000	
60	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 Laporan	352.871.000	
61	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	452.726.000	
62	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	693.396.000	
63	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	307.832.000	

21

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Dassana	Keterangan
1	2	3	4	5
64	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 Laporan	596,765.000	
65	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	441.360.000	
66	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 Laporan	423.866.000	
67	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	375.466.000	
68	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	318.239.000	
69	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	342.094.000	
70	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	204.454.000	
71	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	315.115.000	
72	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	446.039.000	
73	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	376.773.000	
74	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 Laporan	272.344.000	
75	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	325.692.000	
76	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	336.727.000	
77	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	362.672.000	
78	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	331.581.000	
79	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 Laporan	339.961.000	
80	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	323.199.000	
81	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 Laporan	633.733.000	
82	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 Laporan	422.176.000	
83	LHP Interim/Pendakwaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	384.007.000	
84	LHP Tematik ASN I	1 Laporan	8.183.856.000	
85	LHP Tematik ASN II	1 Laporan	8.183.856.000	
86	LHP Tematik ASN III	1 Laporan	8.183.856.000	
87	LHP Tematik ASN IV	1 Laporan	8.183.856.000	
88	LHP Tematik ASN V	1 Laporan	8.183.856.000	
89	LHP Tematik ASN VI	1 Laporan	8.183.856.000	
90	LHP Tematik ASN VII	1 Laporan	8.183.856.000	
91	LHP Auditasi Utang Investigasi	1 Laporan	2.644.149.000	
92	Laporan Penelitian Informasi Natal	1 Laporan	146.216.000	
93	Laporan Pemberian Kateringnya Ahli	1 Laporan	72.397.000	

A.1.



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biayanya	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	Kepaniteraan			
	Perkara Hukum Perseorangan			
	1 Putusan Perkara Pidana	1 Perkara	1.664.000	
	2 Putusan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	950.000	
	3 Putusan Perkara PHI yang Nilai Gagalannya di Bawah 150 jt	1 Perkara	835.000	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum			
	Perkara Hukum Perseorangan			
	1 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat	1 Perkara	556.000	
	2 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat	1 Perkara	750.000	
	3 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 Perkara	770.000	
	4 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 Perkara	990.000	
	5 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 Perkara	1.349.000	
	6 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	1 Perkara	500.000	
	7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	1 Perkara	705.000	
	8 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	775.000	
	9 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	1.000.000	
	10 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	1.349.000	
	11 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	1 Perkara	610.000	
	12 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	1 Perkara	970.000	
	13 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	775.000	
	14 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	1.085.000	
	15 Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	1.550.000	
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)			
	Perkara Hukum Perseorangan			
	1 Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	710.000	
	2 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	1 Perkara	420.000	
	3 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	1 Perkara	1.565.000	
	4 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	1 Perkara	2.016.000	

As.

Kementerian Negara/Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia			
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
	1 Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	14.080.000	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
	2 Lembaga Yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	9.460.000	
	Penanganan Perkara			
	3 Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	1.500.000	

66

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri (010)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan	
1	2	3	4	5	
010.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>				
	<b>Standardisasi Profesi dan Sumber Daya Manusia</b>				
	1 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	3.834.333		
	2 Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	4.394.333		
	3 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	4.312.000		
010.12	<b>Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal</b>				
	4 Seleksi Penerimaan Calon Praja	1 Orang	11.962.870		
	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara</b>				
	1 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Standardisasi dan Sertifikasi	1 Orang	2.564.000		
	2 Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standardisasi dan Sertifikasi	1 Orang	2.940.167		
	3 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1 Orang	2.564.000		
	4 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	1 Orang	2.564.000		
	5 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	2.564.000		
	6 Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	4.843.833		
	7 Pengembangan Kompetensi 14 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	5.718.333		

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
012.01	Kementerian Pertahanan				
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan				
	1 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon I	1 Orang	5.857.690		
	2 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon II	1 Orang	5.998.320		
	3 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon III	1 Orang	6.281.420		
	4 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	5.893.430		
	5 Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon V	1 Orang	10.438.420		
	6 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon I	1 Orang	13.694.320		
	7 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon II	1 Orang	14.054.746		
	8 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon III	1 Orang	14.241.460		
	9 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	14.170.186		
	10 Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon V	1 Orang	16.402.240		
	11 Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon I	1 Orang	1.557.985		
	12 Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon II	1 Orang	1.600.220		
	13 Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon III	1 Orang	1.654.576		
	14 Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	1.605.276		
	15 Latihan Penyebaran Komcad Golongan Perwira, Bintang dan Tamtama Rayon V	1 Orang	2.097.415		
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				
	16 Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Perkara Hukum Perseorangan	1 Orang	8.997.000		
	17 Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion) Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara	955.000		
	18 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 1	1 Perkara	27.760.000		
	19 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk-I Rayon 2	1 Perkara	32.554.000		
	20 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000		
	21 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000		
	22 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk-Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000		
	23 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000		
	24 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000		
	25 Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk-Pk Rayon 1	1 Perkara	15.500.000		
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan				
	26 Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1	1 Orang	5.471.000		
	27 Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2	1 Orang	5.471.000		
	28 Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Orang	5.471.000		
	29 Kursus Intensif Bahasa Inggris Persiapan IELTS	1 Orang	5.471.000		
	30 Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 1	1 Orang	7.103.000		
	31 Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 2	1 Orang	7.103.000		
	32 Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar Gelombang 3	1 Orang	7.103.000		
	33 Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Menengah	1 Orang	7.103.000		
	34 Kursus Intensif Bahasa Indonesia bagi Perwira SAF	1 Orang	7.103.000		
	35 Kursus Intensif Bahasa Indonesia Bagi Calon Mahasiswa Asing Unhan Tahap 1	1 Orang	7.103.000		
	36 Kursus Intensif Bahasa Indonesia Bagi Calon Mahasiswa Asing Unhan Tahap 2	1 Orang	7.103.000		
	37 Kursus Intensif Bahasa Arab Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000		
	38 Kursus Intensif Bahasa Jepang Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000		
	39 Kursus Intensif Bahasa Jerman Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000		
	40 Kursus Intensif Bahasa Korea Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000		
	41 Kursus Intensif Bahasa Mandarin Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000		
	42 Kursus Intensif Bahasa Perancis Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000		
	43 Kursus Intensif Bahasa Rusia Tk. Dasar	1 Orang	5.471.000		
	44 Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Gelombang 1	1 Orang	5.471.000		

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	45 Kursus Intensif Bahasa Arab bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	1 Orang	5.471.000	
	46 Kursus Intensif Bahasa Prancis bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Gelombang 1	1 Orang	5.471.000	
	47 Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Orang	7.847.600	
	48 Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Orang	6.379.044	
	49 Kursus Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pertahanan	1 Orang	5.541.211	
	50 Kursus Manajemen Pendidikan Dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	5.931.611	
	51 Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Orang	5.888.055	
	52 Kursus Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pertahanan	1 Orang	5.606.983	
	53 Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan	1 Orang	5.391.755	
	54 Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Orang	5.436.933	
	55 Kursus Manajemen Pendidikan Dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama	1 Orang	5.610.733	
	56 Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan Pertahanan	1 Orang	5.436.933	
	57 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	4.128.000	
	58 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Ahli	1 Orang	7.931.000	
	59 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1 Orang	453.000	
	60 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Terampil	1 Orang	470.000	
	61 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Terapis Gigi Dan Mulut	1 Orang	453.000	
	62 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Elektronik	1 Orang	665.000	
	63 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Audit Pengadaan Barang Dan Jasa	1 Orang	635.000	
	64 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Presentasi Dengan Model Animasi	1 Orang	512.000	
	65 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembuatan Presentasi Elektronik	1 Orang	512.000	
	66 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembuatan Video Pembelajaran	1 Orang	512.000	
	67 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat II	1 Orang	5.141.000	
	68 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat III	1 Orang	5.241.000	
	69 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ahli Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS	1 Orang	5.235.000	
	70 Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Pertahanan	1 Orang	7.800.000	
	71 Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat Perguruan Tinggi/Setingkat	1 Orang	6.305.000	
	72 Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SMA/Setingkat	1 Orang	6.205.000	
	73 Diklat Kader Bela Negara bagi Siswa Gabungan	1 Orang	6.205.000	
	74 TOP bagi Pelatih Diklat Kader Bela Negara	1 Orang	6.935.000	
012.21	<b>Markas Besar TNI</b>			
	<b>Operasi Bidang Pertahanan</b>			
	1 Peserta Pengkhusnan Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 operasi	369.368	
	2 Pertahanan/Pulau Terluar/Satuan Organik Rayon I	1 operasi	116.550	
	3 Pertahanan/Pulau Terluar/SATUAN ORGANIK Rayon II	1 operasi	118.650	
	4 Pertahanan/Pulau Terluar/SATUAN ORGANIK Rayon III	1 operasi	117.550	
	5 Pertahanan/Pulau Terluar/SATUAN ORGANIK Rayon IV	1 operasi	121.750	
	6 Pertahanan/Pulau Terluar/SATUAN ORGANIK Rayon V	1 operasi	124.850	
	7 Rahwan Rayon I	1 operasi	147.350	
	8 Rahwan Rayon II	1 operasi	149.650	
	9 Rahwan Rayon III	1 operasi	148.650	
	10 Rahwan Rayon IV	1 operasi	152.750	
	11 Rahwan Rayon V	1 operasi	155.850	
	12 Pembentukan Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	2.254.322	
	13 Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	7.292.088	
	14 Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	2.041.929	
	15 Pembentukan 6 Satgas UNIFIL	1 operasi	2.625.956	
	16 Kegiatan 6 Satgas UNIFIL	1 operasi	3.270.000	
	17 Kegiatan Satgas FPC UNIFIL	1 operasi	2.892.240	
	18 Kegiatan Satgas MPU UNIFIL	1 operasi	5.627.000	
	19 Kegiatan Satgas FHQSU UNIFIL	1 operasi	7.068.666	
	20 Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL	1 operasi	9.078.888	
	21 Kegiatan Satgas CIMC UNIFIL	1 operasi	20.027.142	
	22 Kegiatan Satgas Level II UNIFIL	1 operasi	15.663.333	
	23 Gabungan Geler Slip dan Rotasi 6 Satgas UNIFIL	1 operasi	3.261.969	

Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
24	Gabungan Purna Tugas 6 Satgas UNIFIL	1 operasi	2.074.685		
25	Pembentukan Satgas MTF	1 operasi	4.391.940		
26	Kegiatan Satgas MTF	1 operasi	11.435.302		
27	Purna Tugas Satgas MTF	1 operasi	1.581.773		
28	Pembentukan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	2.176.060		
29	Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	7.259.276		
30	Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	2.153.882		
31	Pembentukan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 operasi	2.229.028		
32	Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 operasi	6.754.560		
33	Gelar Sisp dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO	1 operasi	2.670.028		
34	Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO	1 operasi	1.399.000		
35	Pembentukan Satgas Kiri Minusca Car	1 operasi	2.673.590		
36	Kegiatan Satgas Minusca Car	1 operasi	9.958.339		
37	Purna Tugas Satgas Kiri Minusca Car	1 operasi	1.935.046		
38	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 operasi	76.688		
39	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 operasi	80.688		
40	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 operasi	79.688		
41	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 operasi	81.688		
42	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V	1 operasi	83.688		
43	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I	1 operasi	163.648		
44	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II	1 operasi	166.648		
45	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III	1 operasi	172.748		
46	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV	1 operasi	173.748		
47	Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V	1 operasi	181.848		
48	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 operasi	124.441		
49	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 operasi	131.441		
50	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 operasi	136.441		
51	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 operasi	136.441		
52	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 operasi	139.441		
53	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komso TNI Terpusat	1 operasi	230.500		
54	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komso TNI Rayon I	1 operasi	244.657		
55	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komso TNI Rayon II	1 operasi	251.657		
56	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komso TNI Rayon III	1 operasi	250.657		
57	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komso TNI Rayon IV	1 operasi	256.657		
58	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komso TNI Rayon V	1 operasi	259.657		
59	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I	1 operasi	107.605		
60	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II	1 operasi	114.605		
61	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 operasi	113.605		
62	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 operasi	119.605		
63	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 operasi	132.605		
64	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I	1 operasi	99.106		
65	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II	1 operasi	106.106		
66	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III	1 operasi	105.106		
67	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV	1 operasi	111.106		
68	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V	1 operasi	114.106		
69	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pantas, Pam Rahwan dan Pam Puter	1 operasi	183.130		
70	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI	1 operasi	403.000		
71	Peserta Operasi Siber TNI	1 operasi	295.915		
	Operasi Bidang Keamanan				
72	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I	1 operasi	159.455		
73	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II	1 operasi	169.375		
74	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III	1 operasi	168.135		
75	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV	1 operasi	174.335		
76	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V	1 operasi	186.735		
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan				
77	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PK TNI	1 Orang	18.239.615		
78	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PSDP Pab TNI	1 Orang	19.493.885		
79	Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI	1 Orang	19.940.269		
80	Penerimaan CPNSI UU Mabes TNI	1 Orang	1.650.325		



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	81 Diklat Alah PNS	1 Orang	7.795.375	
	82 Lulusan Dikma Chandradimuka Copentar (Pria)	1 Orang	15.399.982	
	83 Lulusan Dikma Chandradimuka Copentar (Wanita)	1 Orang	17.582.946	
	84 Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1 Orang	5.171.258	
	85 Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar Lanjutan	1 Orang	5.172.540	
	86 Pendidikan Pertama PSDP Penerbang TNI	1 Orang	14.598.642	
	87 Pendidikan Lanjutan PSDP PNB TNI	1 Orang	12.492.788	
	88 Pendidikan Pertama (Dikma) PA PK Pria TNI	1 Orang	10.197.129	
	89 Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI	1 Orang	10.788.668	
	90 Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.249.385	
	91 Lulusan Sesko TNI	1 Orang	6.806.000	
	92 Lulusan Dibbangpes Suspa TNI	1 Orang	5.203.050	
	93 Lulusan Dibbangpes Susba TNI	1 Orang	4.578.333	
	94 Lulusan Dibbangpes SIP TNI	1 Orang	15.497.316	
	95 Lulusan Dibbangpes Susjabkima	1 Orang	5.374.433	
	96 Lulusan Dibbangpes Susjabormil	1 Orang	5.361.369	
	97 Lulusan Dibbangpes Susgad Bintal	1 Orang	5.371.773	
	98 Lulusan Dik SAR TNI	1 Orang	5.384.300	
	99 Lulusan Kursus Penanggulangan Bencana Alam	1 Orang	5.386.466	
	100 Kursus Dasar Perwira Intelijen	1 Orang	5.275.000	
	101 Kursus Perwira Kontra Intelijen	1 Orang	5.556.000	
	102 Kursus Perwira Intelijen Strategia	1 Orang	5.240.000	
	103 Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.933.333	
	104 Kursus Wintara Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.666.666	
	105 Kursus Dasar Bintara Intelijen	1 Orang	4.725.000	
	106 Kursus Perwira Intelijen Siber	1 Orang	5.760.000	
	107 Kursus Bintara Intelijen Siber	1 Orang	5.651.851	
	108 Kursus Perwira Intelijen Medis	1 Orang	5.507.777	
	109 Kursus Perwira Intelijen Ekonomi	1 Orang	6.072.222	
	110 Pembekalan Intelijen	1 Orang	1.200.000	
	111 Kursus Perwira Interogator	1 Orang	6.078.000	
	112 Kursus Bintara Interogator	1 Orang	5.950.000	
	113 Seleksi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.785.287	
	114 Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.211.262	
	115 Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303	
	116 Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303	
	117 Seleksi Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.949.224	
	118 Seleksi Kursus Perwira Intelijen	1 Orang	901.166	
	119 Seleksi Kursus Bintara Intelijen	1 Orang	870.600	
	120 Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	167.000	
	121 Penataran/Latihan PA Bangspes	1 Orang	167.000	
	122 Penataran/Latihan BA Bangspes	1 Orang	165.750	
	123 Penataran/Latihan TA Bangspes	1 Orang	164.500	
	124 Sekolah Manajemen Dan Analisa Intelijen (SMAI)	1 Orang	10.646.000	
	125 Kursus Perwira Intelijen Teknik	1 Orang	6.066.666	
	126 Kursus Bintara Intelijen Teknik	1 Orang	5.928.000	
	127 Kursus Perwira Intelijen Strategia Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.943.502	
	128 Kursus Perwira Penggalangan	1 Orang	5.700.000	
	129 Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.653.333	
	130 Kursus Perwira Lipers	1 Orang	5.706.666	
	131 Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.819.209	
	132 Penataran Istri Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.677.966	
	133 Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	5.355.555	
	134 Kursus Dasar Bintara Intelijen Teritorial	1 Orang	4.706.666	
	135 Lulusan Sekolah Terpadu TNI	1 Orang	9.798.272	
	136 Kursus Sandi Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.662.932	
	137 Kursus Perwira Intelijen Strategia Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.400.000	
	138 Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.900.000	
	139 Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.131.212	
	140 Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.909.604	
	141 Kursus Komputer Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.662.932	
	142 Lulusan Kursus Perwira Siber TNI	1 Orang	5.889.183	
	143 Seleksi Sus Jab Oditor Militer	1 Orang	6.188.333	
	144 Seleksi Sus Jab Hakim Militer	1 Orang	6.188.333	
	<b>Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan</b>			
	145 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.411.923	
	146 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	127.441	
	147 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I	1 Orang	142.138	
	148 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II	1 Orang	142.738	
	149 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah III	1 Orang	143.338	
	150 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV	1 Orang	143.938	
	151 Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah V	1 Orang	144.538	
	152 Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	163.616	
	153 Peserta Latihan Pungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	134.875	
	154 Peserta Latihan Prastugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah I)	1 Orang	106.104	
	155 Peserta Latihan Prastugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	108.633	
	156 Peserta Latihan Prastugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	113.804	
	157 Peserta Latihan Prastugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	118.975	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Beuran	Keterangan
1	2	3	4	5
	158 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	127.004	
	159 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	101.407	
	160 Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah III)	1 Orang	103.691	
	161 Peserta Latihan Pratugas Operasi Saigaa Intel	1 Orang	165.159	
	<b>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>			
	162 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Orang	135.000	
	163 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Orang	143.000	
	164 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Orang	146.000	
	165 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Orang	149.000	
	166 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Orang	223.000	
	167 Petunjuk Pembinaan Napi Prajurit	1 Orang	2.595.000	
	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>			
	168 Pengurusan Tahanan Sementara	1 Perkara	49.000	
	169 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	46.880.000	
	170 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	52.030.000	
	171 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	55.490.000	
	172 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	48.460.000	
	173 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	156.170.000	
	174 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmiliti Rayon 1	1 Perkara	102.650.000	
	175 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmiliti Rayon 2	1 Perkara	123.450.000	
	176 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmiliti Rayon 3	1 Perkara	144.100.000	
	177 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmiliti Rayon 4	1 Perkara	144.100.000	
	178 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmiliti Rayon 5	1 Perkara	192.510.000	
	179 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	5.298.000	
	180 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	5.306.000	
	181 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	5.934.000	
	182 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	6.147.000	
	183 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	5.474.000	
	184 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	19.404.000	
	185 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.270.000	
	186 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.130.000	
	187 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.215.000	
	188 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.275.000	
	189 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.130.000	
	190 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.900.000	
	191 Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana	1 Perkara	8.270.000	
	192 Lelang Sita Rampasan	1 Perkara	45.575.000	
	193 Eksekusi Orang/Batang	1 Perkara	17.252.000	
	194 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I	1 Perkara	19.322.000	
	195 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	13.518.000	
	196 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	11.318.000	
	197 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	13.230.000	
	198 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I	1 Perkara	28.302.000	
	199 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	15.803.000	
	200 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	12.405.000	
	201 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	18.336.000	
	202 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk.I	1 Perkara	45.670.000	
	203 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Perkara	20.581.000	
	204 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Perkara	26.581.000	
	205 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Perkara	23.951.000	
	206 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk.I	1 Perkara	122.307.000	
	207 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Perkara	21.965.000	

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	208 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tls. Kasasi	1 Perkara	27.421.000	
	209 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tls. PK	1 Perkara	26.906.000	
	210 Bantuan dan Nasehat Hukum Non Litigasi	1 Perkara	16.528.000	
	211 Pendapat dan Saran Hukum	1 Perkara	965.000	
	212 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	23.530.000	
	213 Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.255.000	
	214 Penyidikan Kriminal Perkara Pidana	1 Perkara	13.387.000	
	215 Pengelahan Dan Penyelesaian Perkara Konelositas	1 Perkara	83.364.000	
012.22	Markas Besar TNI AD			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	3.500.000	
	2 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.000.000	
	3 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.500.000	
	4 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.000.000	
	5 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.500.000	
	6 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.000.000	
	7 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.500.000	
	8 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.000.000	
	9 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.500.000	
	10 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Orang	7.000.000	
	11 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.000.000	
	12 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.500.000	
	13 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.000.000	
	14 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.500.000	
	15 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Orang	8.000.000	
	16 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.000.000	
	17 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.500.000	
	18 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.000.000	
	19 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.500.000	
	20 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	9.000.000	
	21 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.000.000	
	22 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.500.000	
	23 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.000.000	
	24 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.500.000	
	25 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	6.000.000	
	26 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latersar Ter)	1 Orang	3.000.000	
	27 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latersar Ter)	1 Orang	3.500.000	
	28 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latersar Ter)	1 Orang	4.000.000	
	29 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latersar Ter)	1 Orang	4.500.000	
	30 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latersar Ter)	1 Orang	5.000.000	
	31 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latersar Intel)	1 Orang	1.500.000	
	32 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latersar Intel)	1 Orang	2.000.000	
	33 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latersar Intel)	1 Orang	2.500.000	
	34 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latersar Intel)	1 Orang	3.000.000	
	35 Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latersar Intel)	1 Orang	3.500.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besarnya	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	36 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	3.500.000		
	37 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.000.000		
	38 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.500.000		
	39 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.000.000		
	40 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.500.000		
	41 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.000.000		
	42 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.500.000		
	43 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.000.000		
	44 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.500.000		
	45 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	6.000.000		
	46 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	1.000.000		
	47 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	1.500.000		
	48 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	2.000.000		
	49 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	2.500.000		
	50 Latihan Perancangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	3.000.000		
	<b>Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan</b>				
	51 Kopdar Pria	1 Orang	4.950.000		
	52 Kopdar Wanita	1 Orang	4.950.000		
	53 Seram Taruna Pria	1 Orang	5.193.000		
	54 Seram Taruna Wanita	1 Orang	5.193.000		
	55 Sermadatar Pria	1 Orang	5.392.000		
	56 Sermadatar Wanita	1 Orang	5.392.000		
	57 Sermatutur Pria	1 Orang	5.587.000		
	58 Sermatutur Wanita	1 Orang	5.587.000		
	59 Dikmaba Pria Rayon I	1 Orang	3.593.000		
	60 Dikmaba Pria Rayon II	1 Orang	3.643.000		
	61 Dikmaba Pria Rayon III	1 Orang	3.808.000		
	62 Dikmaba Pria Rayon IV	1 Orang	3.857.000		
	63 Dikmaba Pria Rayon V	1 Orang	4.051.000		
	64 Dikmaba Wanita	1 Orang	3.593.000		
	65 Dikmaba Rayon I	1 Orang	3.393.000		
	66 Dikmaba Rayon II	1 Orang	3.440.000		
	67 Dikmaba Rayon III	1 Orang	3.601.000		
	68 Dikmaba Rayon IV	1 Orang	3.638.000		
	69 Dikmaba Rayon V	1 Orang	3.833.000		
	70 Pns Dikmaba Tamtama	1 Orang	3.742.000		
	71 Werving Taruna Matra Darat	1 Orang	26.605.100		
	72 Werving Bintara Umum Matra Darat	1 Orang	6.650.076		
	73 Werving Tamtama Matra Darat Umum	1 Orang	5.090.283		
	74 Diktrukpa Reg/Sus	1 Orang	3.975.000		
	75 Lulusan Diktrukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	3.539.000		
	76 Lulusan Diktrukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	3.586.000		
	77 Lulusan Diktrukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	3.754.000		
	78 Lulusan Diktrukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	3.804.000		
	79 Lulusan Diktrukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	4.003.000		
	80 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.590.000		
	81 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.731.000		
	82 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.738.000		
	83 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.767.000		
	84 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.775.000		
	85 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.307.000		
	86 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.321.000		
	87 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.360.000		
	88 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.384.000		
	89 Peserta Diktrukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.427.000		
	90 Dilat Alih Gelangan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I	1 Orang	4.469.666		
	91 Dilat Alih Gelangan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II	1 Orang	4.392.666		
	92 Dilat Alih Gelangan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III	1 Orang	4.541.000		
	93 Dilat Alih Gelangan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV	1 Orang	4.569.000		
	94 Dilat Alih Gelangan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V	1 Orang	4.745.333		
	95 Pendidikan Siskoad	1 Orang	5.090.000		
	96 Dilatapa I Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.148.000		
	97 Dilatapa I Cab Basmis	1 Orang	3.927.000		
	98 Peserta Siskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon I	1 Orang	6.319.000		
	99 Peserta Siskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon II	1 Orang	6.327.000		
	100 Peserta Siskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon III	1 Orang	6.398.000		
	101 Peserta Siskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon IV	1 Orang	6.387.000		
	102 Peserta Siskoad/Sesko TNI/Lemhannas Rayon V	1 Orang	6.472.000		



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	103 Peserta Diklat I/Diklat II Rayon I	1 Orang	4.224.000		
	104 Peserta Diklat I/Diklat II Rayon II	1 Orang	4.184.000		
	105 Peserta Diklat I/Diklat II Rayon III	1 Orang	4.308.000		
	106 Peserta Diklat I/Diklat II Rayon IV	1 Orang	4.368.000		
	107 Peserta Diklat I/Diklat II Rayon V	1 Orang	4.394.000		
	108 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1 Orang	16.755.000		
	109 Dikbangspespa Cab Satpur/Banpur	1 Orang	3.917.000		
	110 Dikbangspespa Cab Banmin	1 Orang	3.717.000		
	111 Dikcab Perwira Satpur/Banpur	1 Orang	5.256.000		
	112 Dikcab Perwira Banmin	1 Orang	5.011.000		
	113 Dikbangspesba Rayon I	1 Orang	3.369.000		
	114 Dikbangspesba Rayon II	1 Orang	3.415.000		
	115 Dikbangspesba Rayon III	1 Orang	3.565.000		
	116 Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.623.000		
	117 Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.776.000		
	118 Dikjur Bintara Rayon I	1 Orang	3.405.000		
	119 Dikjur Bintara Rayon II	1 Orang	3.469.000		
	120 Dikjur Bintara Rayon III	1 Orang	3.600.000		
	121 Dikjur Bintara Rayon IV	1 Orang	3.643.000		
	122 Dikjur Bintara Rayon V	1 Orang	3.816.000		
	123 Diklatas PNS	1 Orang	6.549.000		
	124 Dikbangspesata Rayon I	1 Orang	3.237.000		
	125 Dikbangspesata Rayon II	1 Orang	3.284.000		
	126 Dikbangspesata Rayon III	1 Orang	3.422.000		
	127 Dikbangspesata Rayon IV	1 Orang	3.462.000		
	128 Dikbangspesata Rayon V	1 Orang	3.654.000		
	129 Dikjur Tamtama Rayon I	1 Orang	3.308.000		
	130 Dikjur Tamtama Rayon II	1 Orang	3.358.000		
	131 Dikjur Tamtama Rayon III	1 Orang	3.507.000		
	132 Dikjur Tamtama Rayon IV	1 Orang	3.544.000		
	133 Dikjur Tamtama Rayon V	1 Orang	3.722.000		
	134 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I	1 Orang	1.228.000		
	135 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II	1 Orang	1.287.000		
	136 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III	1 Orang	1.292.000		
	137 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV	1 Orang	1.297.000		
	138 Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V	1 Orang	1.342.000		
	139 Pendidikan Keahlian Rayon I	1 Orang	3.946.000		
	140 Pendidikan Keahlian Rayon II	1 Orang	3.975.000		
	141 Pendidikan Keahlian Rayon III	1 Orang	4.134.000		
	142 Pendidikan Keahlian Rayon IV	1 Orang	4.177.000		
	143 Pendidikan Keahlian Rayon V	1 Orang	4.364.000		
	144 Pendidikan Komando dan Kultur	1 Orang	5.099.000		
	145 Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus	1 Orang	3.976.000		
	146 Dik Iptek S-1	1 Orang	3.842.000		
	147 Dik Iptek D-3 (Rayon I)	1 Orang	3.308.000		
	148 Dik Iptek D-3 (Rayon II)	1 Orang	3.341.000		
	149 Dik Iptek D-3 (Rayon III)	1 Orang	3.514.000		
	150 Dik Iptek D-3 (Rayon IV)	1 Orang	3.539.000		
	151 Dik Iptek D-3 (Rayon V)	1 Orang	3.762.000		
	152 Dik Iptek SMK (Rayon I)	1 Orang	3.239.000		
	153 Dik Iptek SMK (Rayon II)	1 Orang	3.285.000		
	154 Dik Iptek SMK (Rayon III)	1 Orang	3.462.000		
	155 Dik Iptek SMK (Rayon IV)	1 Orang	3.507.000		
	156 Dik Iptek SMK (Rayon V)	1 Orang	3.701.000		
	157 Dik Iptek D4 Matra Darat	1 Orang	3.746.000		
	158 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I	1 Orang	1.887.000		
	159 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon II	1 Orang	1.845.000		
	160 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III	1 Orang	1.926.000		
	161 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon IV	1 Orang	1.932.000		
	162 Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V	1 Orang	1.957.000		
	163 Diklat II Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.182.000		
	164 Diklat II Cab Banmin	1 Orang	3.961.000		
	165 Latasur CPNS	1 Orang	3.260.000		
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				
	166 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Orang	6.739.000		
	167 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Orang	7.224.000		
	168 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Orang	7.448.000		
	169 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Orang	6.904.000		
	170 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Orang	16.720.000		
	171 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Orang	2.554.000		
	172 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Orang	2.584.000		
	173 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Orang	3.039.000		
	174 Pendapat dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Orang	933.000		
	175 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Orang	13.902.000		

6.1

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	176 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Orang	15.852.000		
	177 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Orang	17.195.000		
	178 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Orang	14.460.000		
	179 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Orang	54.302.000		
	180 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Orang	4.681.000		
	181 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Orang	3.608.000		
	182 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Orang	6.550.000		
	183 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I	1 Orang	30.027.000		
	184 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Orang	34.276.000		
	185 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Orang	37.310.000		
	186 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	31.414.000		
	187 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Orang	124.091.000		
	188 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	8.716.000		
	189 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	9.485.000		
	190 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	10.021.000		
	191 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	8.932.000		
	192 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	25.638.000		
	193 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	14.576.000		
	194 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	15.965.000		
	195 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	17.003.000		
	196 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	15.580.000		
	197 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	41.291.000		
	198 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	12.357.000		
	199 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	13.168.000		
	200 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	13.757.000		
	201 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	12.747.000		
	202 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	29.603.000		
	203 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Orang	27.906.000		
	204 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Orang	32.554.000		
	205 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Orang	35.856.000		
	206 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	29.238.000		
	207 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Orang	131.476.000		
	208 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	10.114.000		
	209 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	12.036.000		
	210 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	13.416.000		
	211 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	10.643.000		
	212 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	52.535.000		
	213 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	15.285.000		
	214 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	17.445.000		
	215 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	19.035.000		
	216 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	16.515.000		



Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Pertahanan (012)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	217 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	58.818.000	
	218 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	15.510.000	
	219 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	18.590.000	
	220 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	20.790.000	
	221 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	16.390.000	
	222 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	83.150.000	
	223 Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)	1 Orang	926.000	
	224 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon I	1 Orang	10.590.000	
	225 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon II	1 Orang	11.329.000	
	226 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon III	1 Orang	12.158.000	
	227 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon IV	1 Orang	12.532.000	
	228 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon V	1 Orang	44.711.000	
	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>			
	229 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Perkara	8.915.000	
	230 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Perkara	9.620.000	
	231 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Perkara	10.095.000	
	232 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Perkara	9.195.000	
	233 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Perkara	23.000.000	
	234 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I	1 Perkara	6.242.000	
	235 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II	1 Perkara	6.642.000	
	236 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III	1 Perkara	6.902.000	
	237 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV	1 Perkara	6.357.000	
	238 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V	1 Perkara	13.917.000	
	239 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Perkara	2.315.000	
	240 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Perkara	2.480.000	
	241 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Perkara	2.585.000	
	242 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Perkara	2.355.000	
	243 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Perkara	5.700.000	
	244 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Perkara	49.850	
	245 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Perkara	52.000	
	246 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Perkara	55.000	
	247 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Perkara	50.000	
	248 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Perkara	65.000	
	249 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Pemuntutan Rayon I	1 Perkara	45.520	
	250 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Pemuntutan Rayon II	1 Perkara	47.810	
	251 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Pemuntutan Rayon III	1 Perkara	51.844	
	252 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Pemuntutan Rayon IV	1 Perkara	46.103	
	253 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Pemuntutan Rayon V	1 Perkara	59.931	
	254 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon I	1 Perkara	11.915.000	
	255 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon II	1 Perkara	12.620.000	
	256 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon III	1 Perkara	13.095.000	
	257 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon IV	1 Perkara	12.195.000	
	258 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon V	1 Perkara	26.000.000	
	259 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon I	1 Perkara	116.761	
	260 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon II	1 Perkara	137.238	
	261 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon III	1 Perkara	140.238	
	262 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon IV	1 Perkara	143.761	
	263 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon V	1 Perkara	167.285	
	264 Pengawalan Polisi Militer Rayon I	1 Perkara	360.000	
	265 Pengawalan Polisi Militer Rayon II	1 Perkara	370.000	
	266 Pengawalan Polisi Militer Rayon III	1 Perkara	380.000	
	267 Pengawalan Polisi Militer Rayon IV	1 Perkara	380.000	
	268 Pengawalan Polisi Militer Rayon V	1 Perkara	400.000	
012.23	<b>Markas Besar TNI AL</b>			
	<b>Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan</b>			
	1 Latihan Kematrasi	1 Orang	108.000	
	2 Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	204.000	
	3 Latihan Satuan	1 Orang	99.000	
	4 Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri	1 Orang	882.000	
	5 Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri	1 Orang	159.000	
	6 Latihan Perencanaan Maritim	1 Orang	31.000	
	7 Latihan Satuan Marinir	1 Orang	96.000	
	8 Latihan Perencanaan Taktik-Denjok	1 Orang	95.000	
	9 Latihan Satuan Taktik-Denjok	1 Orang	182.600	
	10 Latihan Intelejen TNI AL	1 Orang	304.000	
	<b>Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan</b>			
	11 Werving Calon Taruna/Taruni AAL	1 Orang	25.747.000	
	12 Werving Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.437.000	
	13 Werving Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.661.000	
	14 Peserta Diklat	1 Orang	3.952.000	
	15 Peserta Diklatnya Reguler dan Singkat	1 Orang	3.154.000	
	16 Peserta Diklatnya Reguler dan Singkat	1 Orang	3.566.000	
	17 Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.810.000	
	18 Peserta Seskoal	1 Orang	5.101.000	
	19 Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.752.000	
	20 Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	3.904.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	21 Seleksi Dik S-2 STTAL	1 Orang	3.977.000		
	22 Peserta Dikspespa	1 Orang	2.771.000		
	23 Peserta Dikspesha	1 Orang	2.679.000		
	24 Peserta Dik Brevet	1 Orang	4.345.000		
	25 Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	6.620.000		
	26 Dikma Koptar Pria	1 Orang	4.918.000		
	27 Dikma Koptar Wanita	1 Orang	4.918.000		
	28 Dikma Sektar Pria	1 Orang	6.667.000		
	29 Dikma Sektar Wanita	1 Orang	6.667.000		
	30 Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	6.952.000		
	31 Dikma Sermadatar Wanita	1 Orang	6.952.000		
	32 Dikma Sermatutur Pria	1 Orang	7.297.000		
	33 Dikma Sermatutur Wanita	1 Orang	7.297.000		
	34 Diksergolan Perwira/PA PK Matra Laut	1 Orang	5.520.000		
	35 Dikma Bintara Pria Matra Laut	1 Orang	3.947.000		
	36 Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1 Orang	3.947.000		
	37 Diksergolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.707.000		
	38 Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.591.000		
	39 Diksergolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.389.000		
	40 Dik Seskual	1 Orang	5.787.000		
	41 Diklapa Matra Laut	1 Orang	4.082.000		
	42 Dikrukpa Matra Laut	1 Orang	3.830.000		
	43 Diktukba Matra Laut	1 Orang	3.639.000		
	44 Dikbangsua Perwira Matra Laut	1 Orang	4.150.000		
	45 Dikbangsua Bintara Matra Laut	1 Orang	3.616.000		
	46 Dikbangsua Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.371.000		
	47 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.303.775		
	48 Dikus Penerbang Matra Laut	1 Orang	5.803.000		
	49 Dikus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.694.000		
	50 Dik STTAL D-3	1 Orang	3.572.000		
	51 Dik STTAL S-1	1 Orang	3.936.000		
	52 Dik S-2 STTAL	1 Orang	4.248.000		
	53 Dikma Bintara Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.947.000		
	54 Diksergolan Bintara Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.707.000		
	55 Dikma Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.591.000		
	56 Diksergolan Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.389.000		
	57 Dikma Bintara Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.947.000		
	58 Diksergolan Bintara Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.707.000		
	59 Dikma Tamtama Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.591.000		
	60 Diksergolan Tamtama Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.389.000		
	61 Dikma Bintara Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.960.000		
	62 Diksergolan Bintara Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.720.000		
	63 Dikma Tamtama Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.604.000		
	64 Diksergolan Tamtama Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.402.000		
	65 Peserta Dikspespa	1 Orang	2.380.000		
	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>				
	66 Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	53.825.000		
	67 Pendapat Dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut	1 Perkara	966.000		
	68 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	6.739.000		
	69 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	7.224.000		
	70 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	7.589.000		
	71 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	6.904.000		
	72 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	16.720.000		
	73 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.554.000		
	74 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.564.000		
	75 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	3.039.000		
	76 Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer	1 Perkara	933.000		
	77 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	13.903.000		
	78 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	15.893.000		
	79 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	17.195.000		
	80 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	14.460.000		
	81 Bantuan Dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	54.302.000		
	82 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.681.000		
	83 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.608.000		
	84 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.550.000		
	85 Pendapat dan Saran Hukum Pidana Umum	1 Perkara	630.000		
	86 Bantuan dan Nasehat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	30.027.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
87	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	34.276.000		
88	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	37.310.000		
89	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	31.414.000		
90	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	124.091.000		
91	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1	1 Perkara	8.716.000		
92	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2	1 Perkara	9.485.000		
93	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3	1 Perkara	10.021.000		
94	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4	1 Perkara	8.932.000		
95	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5	1 Perkara	25.638.000		
96	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.576.000		
97	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.965.000		
98	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	17.003.000		
99	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.580.000		
100	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	41.291.000		
101	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	12.357.000		
102	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	13.108.000		
103	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	13.757.000		
104	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	12.747.000		
105	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	29.603.000		
106	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Perkara	27.906.000		
107	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	32.554.000		
108	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	35.856.000		
109	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	29.238.000		
110	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	131.476.000		
111	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000		
112	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000		
113	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.416.000		
114	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000		
115	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	52.535.000		
116	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000		
117	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000		
118	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	19.035.000		
119	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.515.000		
120	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	58.816.000		
121	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.510.000		
122	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.590.000		
123	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.790.000		
124	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	16.390.000		
125	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	83.150.000		
126	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1	1 Perkara	10.590.000		
127	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2	1 Perkara	11.329.000		
128	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3	1 Perkara	12.158.000		
129	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4	1 Perkara	12.532.000		
130	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5	1 Perkara	44.711.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.23	131 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tan Penggugat	1 Perkara	926.000	
	132 Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tan Tergugat	1 Perkara	926.000	
	133 Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Perkara	8.734.600	
	<b>Markas Besar TNI AU</b>			
	<b>Operasi Bidang Pertahanan</b>			
	1 Peserta Operasi Intel Taktis TNI	1 operasi	392.000	
	<b>Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan</b>			
	2 Peserta Latihan Kematroan	1 Orang	95.718	
	3 Peserta Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri	1 Orang	7.609.702	
	4 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	185.394	
	<b>Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan</b>			
	5 Werving Taruna/Taruni	1 Orang	27.382.960	
	6 Werving Bintara Matra Udara	1 Orang	6.845.708	
	7 Werving Tamtama Matra Udara	1 Orang	4.956.877	
	8 Peserta Seskos dan Sessau Matra Udara	1 Orang	2.561.700	
	9 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 Orang	1.736.000	
	10 Peserta Setukpa Matra Udara	1 Orang	1.587.060	
	11 Peserta Setukba Matra Udara	1 Orang	1.363.620	
	12 Sertar Pria	1 Orang	75.255.180	
	13 Sertar Wanita	1 Orang	75.255.180	
	14 Pendidikan Sermaadotar Pria	1 Orang	78.148.970	
	15 Pendidikan Sermaadotar Wanita	1 Orang	78.148.970	
	16 Pendidikan Sermatutur Pria	1 Orang	82.961.360	
	17 Pendidikan Sermatutur Wanita	1 Orang	82.961.360	
	18 Lulusan Diksangolan Perwira Matra Udara	1 Orang	5.478.210	
	19 Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	20 Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 Orang	3.265.690	
	21 Lulusan Diksangolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 Orang	3.204.941	
	22 Lulusan Diksangolan Bintara Matra Udara ISD	1 Orang	3.204.941	
	23 Pendidikan Pertama Secatan Pria Matra Udara	1 Orang	2.943.610	
	24 Lulusan Diksangolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.005.358	
	25 Pendidikan Sekbang/Seksnaw Matra Udara	1 Orang	7.054.322	
	26 Pendidikan Sekbang/Seksnaw Matra Udara Lanjutan	1 Orang	7.054.322	
	27 Pendidikan SSP/SIN Matra Udara	1 Orang	6.973.188	
	28 Pendidikan Seskosau	1 Orang	5.054.263	
	29 Pendidikan Sessau	1 Orang	4.910.030	
	30 Pendidikan Sekkau	1 Orang	3.886.550	
	31 Pendidikan Suspajemen	1 Orang	3.847.000	
	32 Pendidikan Setukpa	1 Orang	3.642.843	
	33 Pendidikan Setukba	1 Orang	3.390.143	
	34 Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	3.612.758	
	35 Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 Orang	3.027.750	
	36 Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.933.208	
	37 Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	813.130	
	38 Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara	1 Orang	699.920	
	39 Koptar Pria	1 Orang	32.029.600	
	40 Koptar Wanita	1 Orang	32.029.600	
	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>			
	41 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Perkara	8.915.000	
	42 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Perkara	9.620.000	
	43 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Perkara	10.095.000	
	44 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Perkara	9.195.000	
	45 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Perkara	23.000.000	
	46 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Perkara	6.242.000	
	47 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Perkara	6.642.000	
	48 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Perkara	6.902.000	
	49 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Perkara	6.357.000	
	50 Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Perkara	13.917.000	
	51 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Perkara	2.315.000	
	52 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Perkara	2.480.000	
	53 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Perkara	2.583.000	
	54 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Perkara	2.355.000	
	55 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Perkara	5.700.000	
	56 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Perkara	49.850	
	57 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Perkara	52.000	
	58 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Perkara	55.000	
	59 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Perkara	50.000	
	60 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Perkara	65.000	
	61 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 1	1 Perkara	6.739.000	
	62 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 2	1 Perkara	7.224.000	
	63 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 3	1 Perkara	7.559.000	
	64 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 4	1 Perkara	6.904.000	
	65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 5	1 Perkara	16.720.000	
	66 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Banding	1 Perkara	2.554.000	
	67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. Kasasi	1 Perkara	2.564.000	

K/

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. PK	1 Perkara	3.039.000		
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Perkara	13.902.000		
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Perkara	15.852.000		
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Perkara	17.195.000		
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Perkara	14.460.000		
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Perkara	54.302.000		
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.681.000		
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.608.000		
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.550.000		
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 1	1 Perkara	30.027.000		
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 2	1 Perkara	34.276.000		
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 3	1 Perkara	37.310.000		
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 4	1 Perkara	31.414.000		
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 5	1 Perkara	124.091.000		
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 1	1 Perkara	8.716.000		
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 2	1 Perkara	9.485.000		
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 3	1 Perkara	10.021.000		
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 4	1 Perkara	8.932.000		
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 5	1 Perkara	25.638.000		
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.576.000		
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.965.000		
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	17.003.000		
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.580.000		
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	41.291.000		
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	12.357.000		
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	13.108.000		
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	13.757.000		
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	12.747.000		
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	29.603.000		
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Perkara	27.906.000		
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	32.554.000		
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	35.856.000		
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Perkara	29.238.000		
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Perkara	131.476.000		
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000		
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000		
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.416.000		
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000		
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	52.539.000		
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000		
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000		
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	19.035.000		



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	110 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.515.000	
	111 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	58.816.000	
	112 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.510.000	
	113 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.590.000	
	114 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.790.000	
	115 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	16.390.000	
	116 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	83.150.000	
	117 Pendapat dan Saran Hukum (PSH)	1 Perkara	926.000	
	118 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1	1 Perkara	10.590.000	
	119 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2	1 Perkara	11.329.000	
	120 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3	1 Perkara	12.158.000	
	121 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4	1 Perkara	12.532.000	
	122 Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5	1 Perkara	44.711.000	
	123 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1	1 Perkara	11.915.000	
	124 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2	1 Perkara	12.620.000	
	125 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3	1 Perkara	13.095.000	
	126 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4	1 Perkara	12.195.000	
	127 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5	1 Perkara	26.000.000	
	128 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 1	1 Perkara	116.761	
	129 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 2	1 Perkara	137.238	
	130 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 3	1 Perkara	140.238	
	131 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 4	1 Perkara	143.761	
	132 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon 5	1 Perkara	167.285	
	133 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1	1 Perkara	45.520	
	134 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2	1 Perkara	47.810	
	135 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3	1 Perkara	51.844	
	136 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4	1 Perkara	46.103	
	137 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5	1 Perkara	59.931	

KL



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.03	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kerja Sama 1 Penyusunan Raskah Kerja Sama Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 2 Rekomendasi Pengakuan Kode Etik 3 Penyelesaian Pengaduan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 4 Pendampingan Peradilan Anak 5 Pembimbingan dan Pengawasan 6 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	1 Kesepakatan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Orang 1 Orang 1 Orang	19.480.000 11.170.000 10.824.000 3.540.000 2.350.000 1.890.000	
013.06	Direktorat Jenderal Imigrasi Operasi Bidang Keamanan 1 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Operasi Bidang Keamanan 2 Operasi Mandiri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi 3 Operasi Gabungan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi 4 Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Operasi Bidang Keamanan 5 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah 6 Operasi Mandiri di Wilayah 7 Operasi Gabungan di Wilayah 8 Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 9 Pemantauan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	1 Operasi 1 Operasi 1 Operasi 1 Operasi 1 Operasi 1 Operasi 1 Operasi 1 Operasi 1 Laporan	91.415.000 92.415.000 87.534.000 108.136.000 42.640.000 53.555.000 90.097.000 125.216.000 18.566.000	
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 1 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat 2 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Orang 1 Kelompok Masyarakat	8.000.000 10.670.000	
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Layanan Manajemen SDM Internal 1 Pendidikan Taruna Tk. I Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 2 Pendidikan Taruna Tk. II Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 3 Pendidikan Taruna Tk. III Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 4 Pendidikan Taruna Tk. IV Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 5 Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 6 Pendidikan Taruna Tk. I Politeknik Imigrasi 7 Pendidikan Taruna Tk. II Politeknik Imigrasi 8 Pendidikan Taruna Tk. III Politeknik Imigrasi 9 Pendidikan Taruna Tk. IV Politeknik Imigrasi 10 Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi 11 Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang SPPI Bagi Aparatur Perpek Hukum dan Instansi Teknik Lainnya	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	30.536.000 27.839.000 27.724.000 28.495.000 9.557.000 22.984.000 25.196.000 24.867.000 23.725.000 11.692.000 10.973.000	

Al

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertanian (018)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan	
1	2	3	4	5	
018.02	Inspektorat Jenderal				
	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
	1 Laporan Hasil Audit pada Saker Lingkup mitra kerja	1 Laporan	74.354.588		
	2 Laporan Hasil Pengawasan SPP Lingkup mitra kerja	1 Laporan	75.555.000		
	3 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Lingkup mitra kerja Inspektorat	1 Laporan	40.644.000		
	4 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan dan Revisi RKAKL K/L	1 Laporan	34.773.444		
	5 Laporan Hasil Audit pada Saker Lingkup mitra kerja	1 Laporan	77.211.600		
	6 Laporan Hasil Pengawasan SPP pada Saker Lingkup mitra	1 Laporan	61.129.000		
	7 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup mitra kerja	1 Laporan	39.188.000		
	8 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan dan Revisi RKAKL	1 Laporan	28.100.750		
	9 Laporan Hasil Audit pada Saker Lingkup mitra kerja	1 Laporan	70.565.588		
	10 Laporan Hasil Pengawasan SPP Lingkup Lingkup mitra kerja	1 Laporan	60.629.000		
	11 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Lingkup mitra	1 Laporan	53.982.000		
	12 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan dan Revisi RKAKL	1 Laporan	51.262.375		
	13 Laporan Hasil Audit pada Saker Lingkup mitra kerja	1 Laporan	70.219.529		
	14 Laporan Hasil Pengawasan SPP Lingkup mitra kerja	1 Laporan	60.004.000		
	15 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup mitra kerja	1 Laporan	29.588.000		
	16 Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan dan Revisi RKAKL	1 Laporan	18.255.000		
	17 Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	73.795.000		
018.08	Directorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian				
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan				
	1 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur	1 Unit	165.000.000		
	2 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur	1 Unit	128.000.000		
	3 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah	1 Unit	140.000.000		
	4 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah	1 Unit	105.000.000		
	5 Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	1 Unit	127.000.000		
	6 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat	1 Unit	95.000.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
022.02	Inspektorat Jenderal				
	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
	1 Laporan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri	1 Dokumen	443.916.000		
	2 Laporan Hasil Revisi Rencana Kebutuhan BMN	1 Dokumen	291.519.000		
	3 Laporan Hasil Revisi LK BA 022 Tingkat UAKPA	1 Dokumen	188.344.000		
	4 Laporan Hasil Revisi LK BA 022 Tingkat UAPPA-E 1	1 Dokumen	80.675.000		
	5 Laporan Hasil Revisi LK BA 022 Tingkat UAPA	1 Dokumen	193.512.000		
	6 Laporan Tindak Lanjut Revisi LK BA 022	1 Dokumen	210.533.000		
	7 Laporan Hasil Revisi LK BA 999.07 Tingkat UAPA	1 Dokumen	61.848.000		
	8 Laporan Hasil Revisi PPIPK BA 022 Tingkat UAKPA	1 Dokumen	98.637.000		
	9 Laporan Hasil Revisi PPIPK BA 022 Tingkat UAPPA	1 Dokumen	32.868.000		
	10 Laporan Hasil Revisi PPIPK BA 022 Tingkat UAPA	1 Dokumen	88.584.000		
	11 Laporan Hasil Revisi PPIPK BA 999 Tingkat UAPA	1 Dokumen	63.180.000		
	12 Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tingkat Eselon I	1 Dokumen	479.513.000		
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan				
	Kerja sama				
	13 Kerja sama (SBBQ)	1 Kesepakatan	66.266.000		
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
	14 Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu	1 NSPK	388.660.000		
	Diklat (SBBQ)				
	15 Standar Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 NSPK	194.685.000		

R.I.

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
023.15	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi				
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				
	1 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan	1 Orang	4.383.381		
	2 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan	1 Orang	6.257.276		

AJ

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
024.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>			
	1 IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah suli kategori I (daerah suli selain Provinsi Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	36.300.000	
	2 IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah suli kategori II (daerah suli Provinsi Papua dan Papua Barat)	1 Layanan	43.000.000	
	3 Survei Darah Massal Malaria (angka parasite rate)	1 Layanan	13.350.000	
	4 Survei Darah Massal Malaria (angka parasite rate) di daerah suli	1 Layanan	25.300.000	
	5 Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria pasca POPM (Pre TAS)	1 Layanan	43.320.000	
	6 Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria pasca POPM (Pre TAS) daerah suli	1 Layanan	72.630.000	
	7 Penyemprotan fokus keong schistosomiasis	1 Layanan	30.375.000	
	8 Survei Sentinel Malaria Knowtest	1 Layanan	9.100.000	
	9 IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah)	1 Layanan	26.300.000	
	10 Kemoprofilaksis Kuala	1 Orang	165.000	
	11 Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Institusi	1 Orang	27.000	
024.05	<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>			
	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>			
	1 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	1 Layanan	600.000	
	2 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	1 Layanan	800.000	
	3 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN	1 Layanan	800.000	
	4 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	1 Layanan	1.455.000	
	5 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional	1 Layanan	2.200.000	
	6 Layanan kewaspadaan darurat dan rujukan (kategori I)	1 Layanan	940.000	
	7 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	1 Layanan	1.124.000	
	8 Layanan survei faktor risiko penyakit pes	1 Layanan	2.585.000	
	9 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	1 Layanan	439.000	
	10 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	1 Layanan	1.239.000	
	11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	1 Layanan	320.000	
	12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	1 Layanan	1.620.000	
	13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare	1 Layanan	320.000	
	14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS (HS)	1 Layanan	1.224.000	
	15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	1 Layanan	5.415.000	
	16 Layanan Kewaspadaan darurat dan rujukan kategori II (HS)	1 Layanan	800.000	
	17 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS)	1 Layanan	600.000	
	18 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	1 Layanan	870.000	
	19 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria kategori 2	1 Layanan	1.920.000	
	20 Layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium (HS)	1 Layanan	38.180.000	
	21 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD kategori II (HS)	1 Layanan	320.000	

21

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	Inspektorat Jenderal Layanan Audit Internal	1 Dokumen	199.065.000	
025.03	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bantuan Peselatan/Sorama	1 Unit	45.000	
	1 Kitab Suci Agama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Islam yang Disediakan			

AS



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial			
	Pendidikan Tinggi			
	1 Mahasiswa Prodi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	5.322.020	
	2 Mahasiswa Prodi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	4.562.791	
	3 Mahasiswa Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	1 Orang	4.712.500	
	4 Mahasiswa Prodi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	1 Orang	19.926.900	

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan [032]				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.04	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</b>			
	<b>Bantuan Hewan</b>			
1	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	35.464	
2	Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	53.952	
3	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	100.000	
4	Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	153.850	
5	Calon Induk Unggul Ikan laut yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	325.479	
6	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	323	
7	Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	49	
8	Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	231	
9	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	672	
10	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	5.515	
	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			
11	Sampel Residu Layanan UPT	1 Sampel	950.042	
12	Sampel Kualitas Air Layanan UPT	1 Sampel	203.061	
13	Sampel Patologi Layanan UPT	1 Sampel	577.146	
14	Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	1 Sampel	535.640	
15	Sampel Biologi Molekuler Layanan UPT	1 Sampel	951.677	
	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			
16	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) / Surveilans	1 Sampel	887.853	
17	Sampel Nutrisi Pakan	1 Sampel	514.997	
	<b>Penyidikan dan Pengujian Penyakit</b>			
18	Sampel Obat Ikan	1 Sampel	620.072	
19	Sampel Mutu Pakan	1 Sampel	951.985	
032.05	<b>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Penanganan Perikanan</b>			
1	Perkara TPSP Suli yang Ditangani	1 Perkara	106.050.000	
2	Perkara TPSP Sedang yang Ditangani	1 Perkara	85.400.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (036)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
036.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah 1 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	368.885.000		

AN

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
054.01	Badan Pusat Statistik				
	Deta dan Informasi Publik				
	1 Publikasi/Laporan Indeks Pembangunan Manusia	1 Publikasi/Laporan	925.589.000		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
	2 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	1 Dokumen	27.482.389		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
	3 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	1 Dokumen	26.569.921		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
	4 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	1 Dokumen	27.921.894		
	Layanan Manajemen SDM Internal				
	5 Diklat Teknis Substansi	1 Layanan	8.385.585		
	6 Diklat Fungsional	1 Layanan	17.584.230		
	7 Standardisasi dan Sertifikasi	1 Layanan	6.967.441		
	Layanan Manajemen SDM Internal				
	8 Program DIII	1 Layanan	4.617.370		
	9 Program D IV	1 Layanan	5.369.863		

A.1

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (OSG)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
056.01	Sekretariat Jenderal				
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	1 PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	1 Bidang	214.500		
	2 PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	1 Bidang	182.700		
	3 PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	1 Bidang	151.800		
	4 PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	1 Bidang	118.200		
	5 PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	1 Bidang	85.500		
	6 PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	1 Bidang	231.500		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	7 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	1 Bidang	473.600		
	8 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	1 Bidang	402.800		
	9 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	1 Bidang	334.100		
	10 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	1 Bidang	259.400		
	11 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	1 Bidang	195.100		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	12 PBT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	422.000		
	13 PBT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	357.100		
	14 PBT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	294.200		
	15 PBT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	225.700		
	16 PBT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	159.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	17 PBT PTSL Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Kategori	1 Bidang	8.280.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	18 PBT HKB Redistribusi Luas 1 - 10 Ha Kategori 3	1 Bidang	8.280.000		
	19 PBT HKB Redistribusi Luas 10 - 100 Ha Kategori 3	1 Bidang	24.170.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	20 PBT HKB Redistribusi Luas 100 - 1000 Ha Kategori 3	1 Bidang	37.730.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
	21 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	1.173.000		
	22 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	998.000		
	23 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	828.000		
	24 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	643.000		
	25 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	463.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
	26 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	2.273.000		
	27 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	1.923.000		
	28 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	1.583.000		
	29 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	1.213.000		
	30 PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	926.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
	31 PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	6.206.000		
	32 PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	5.331.000		
	33 PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	4.481.000		
	34 PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	3.556.000		
	35 PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	2.656.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
	36 PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	1 Hektar	433.528		
	37 PBT PTSL Desa Lengkap Luar Jawa	1 Hektar	240.492		
	38 PBT PTSL Desa Lengkap Kepulauan	1 Hektar	253.005		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
	39 PBT Peningkatan Kualitas Menuju Kota Lengkap Jawa Bali	1 Hektar	386.238		
	40 PBT Peningkatan Kualitas Menuju Kota Lengkap Luar Jawa	1 Hektar	230.816		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	41 SHAT PTSL ASN Kategori 1	1 Bidang	259.000		
	42 SHAT PTSL ASN Kategori 2	1 Bidang	226.000		
	43 SHAT PTSL ASN Kategori 3	1 Bidang	195.000		
	44 SHAT PTSL ASN Kategori 4	1 Bidang	160.000		
	45 SHAT PTSL ASN Kategori 5	1 Bidang	126.000		
	46 SHAT PTSL ASN Kategori 6	1 Bidang	357.000		
	47 SHAT PTSL PM Kategori 5	1 Bidang	92.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	48 SHAT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	292.000		
	49 SHAT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	254.000		
	50 SHAT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	217.000		
	51 SHAT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	176.000		
	52 SHAT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	136.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
	53 SHAT Redistribusi Tanah	1 Bidang	14.000		
	54 SHAT Konsolidasi Tanah	1 Bidang	14.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
	55 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1	1 Bidang	875.400		
	56 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2	1 Bidang	735.400		
	57 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3	1 Bidang	599.400		
	58 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4	1 Bidang	451.400		
	59 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	1 Bidang	307.400		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
	60 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	1 Bidang	1.793.400		
	61 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	1 Bidang	1.495.900		
	62 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 3	1 Bidang	1.206.900		
	63 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 4	1 Bidang	892.400		
	64 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	1 Bidang	586.400		

AN

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (056)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
65	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 1	1 Bidang	3.731.400		
66	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 2	1 Bidang	3.101.400		
67	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 3	1 Bidang	2.489.400		
68	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 4	1 Bidang	1.823.400		
69	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	1 Bidang	1.175.400		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
70	SK Redistribusi Tanah Kategori I	1 Bidang	314.000		
71	SK Redistribusi Tanah Kategori II	1 Bidang	277.000		
72	SK Redistribusi Tanah Kategori III	1 Bidang	241.000		
73	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	1 Bidang	202.000		
74	SK Redistribusi Tanah Kategori V	1 Bidang	164.000		
75	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	1 Bidang	445.000		
	<b>Prasarana Pengembangan Kawasan</b>				
76	Data dan Informasi P4T Kategori I	1 bidang	114.000		
77	Data dan Informasi P4T Kategori II	1 bidang	104.000		
78	Data dan Informasi P4T Kategori III	1 bidang	95.000		
79	Data dan Informasi P4T Kategori IV	1 bidang	85.000		
80	Data dan Informasi P4T Kategori V	1 bidang	82.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Lembaga</b>				
81	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Lembaga	129.551.000		
82	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Lembaga	118.487.000		
83	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Lembaga	115.818.000		
84	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Lembaga	113.893.000		
85	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Lembaga	117.989.000		
	<b>Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</b>				
86	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Bidang	520.780		
87	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Bidang	457.480		
88	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Bidang	423.120		
89	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Bidang	380.460		
90	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Bidang	353.500		

61



Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
057.01	Perpustakaan Nasional			
	Sarana Bidang Pendidikan			
	1 Alih Media Bahan Perpustakaan Terotak Media Kertas	1 Paket	10.040.000	
	2 Alih Media Bahan Perpustakaan Format Audio	1 Paket	9.990.000	

Ad.

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
059.03	<b>Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>				
	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>				
	1 Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000		
	2 Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu)	1 Layanan	63.046.000		
	3 Balmon Kelas I Jakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000		
	4 Balmon Kelas I Jakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	21.340.000		
	5 Balmon Kelas I Jakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	70.810.000		
	6 Balmon Kelas I Jakarta - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000		
	7 Balmon Kelas I Jakarta - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000		
	8 Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000		
	9 Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Koordinasi Hasil Gangguan)	1 Layanan	10.230.000		
	10 Balmon Kelas I Jakarta - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi)	1 Layanan	24.920.000		
	11 Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.021.000		
	12 Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.052.000		
	13 Balmon Kelas I Medan - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	9.422.000		
	14 Balmon Kelas I Medan - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	37.418.000		
	15 Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.079.000		
	16 Balmon Kelas I Medan - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	37.660.000		
	17 Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000		
	18 Balmon Kelas I Medan - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara)	1 Layanan	37.660.000		
	19 Balmon Kelas I Medan - Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Dalam Kota	1 Layanan	5.024.000		
	20 Balmon Kelas I Medan - Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	23.792.000		
	21 Balmon Kelas I Bandung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.310.000		
	22 Balmon Kelas I Bandung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.560.000		
	23 Balmon Kelas I Bandung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.610.000		
	24 Balmon Kelas I Bandung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	46.590.000		
	25 Balmon Kelas I Bandung - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.310.000		
	26 Balmon Kelas I Bandung - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.560.000		
	27 Balmon Kelas I Bandung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.310.000		
	28 Balmon Kelas I Bandung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.160.000		
	29 Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000		
	30 Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	23.700.000		
	31 Balmon Kelas I Semarang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	28.900.000		

Ad

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
32	Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	17.932.000	
33	Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	50.480.000	
34	Balmon Kelas I Semarang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	59.441.000	
35	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
36	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.700.000	
37	Balmon Kelas I Semarang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut (Karimunjawa)	1 Layanan	28.900.000	
38	Balmon Kelas I Semarang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.350.000	
39	Balmon Kelas I Semarang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.700.000	
40	Balmon Kelas I Surabaya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.370.000	
41	Balmon Kelas I Surabaya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	24.725.000	
42	Balmon Kelas I Surabaya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	25.545.000	
43	Balmon Kelas I Surabaya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	90.015.000	
44	Balmon Kelas I Surabaya - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.370.000	
45	Balmon Kelas I Surabaya - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.815.000	
46	Balmon Kelas I Surabaya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.800.000	
47	Balmon Kelas I Surabaya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.750.000	
48	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
49	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.450.000	
50	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.700.000	
51	Balmon Kelas I Samarinda - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.131.000	
52	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.505.000	
53	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	64.470.000	
54	Balmon Kelas I Samarinda - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	69.920.000	
55	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
56	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.450.000	
57	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat dan Laut	1 Layanan	24.450.000	
58	Balmon Kelas I Samarinda - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.250.000	
59	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.200.000	
60	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Darat	1 Layanan	24.450.000	
61	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.250.000	
62	Balmon Kelas I Samarinda - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.450.000	
63	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.560.000	
64	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	28.075.000	

*Handwritten signature*

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
65	Balmon Kelas I Makassar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	24.275.000		
66	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Makassar	1 Layanan	18.480.000		
67	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	76.200.000		
68	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	26.025.000		
69	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	24.275.000		
70	Balmon Kelas I Makassar - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.560.000		
71	Balmon Kelas I Makassar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos Informatika Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	81.095.000		
72	Balmon Kelas I Makassar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	24.275.000		
73	Balmon Kelas I Makassar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	27.275.000		
74	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.410.000		
75	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	22.300.000		
76	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.330.000		
77	Balai Monitor Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	62.125.000		
78	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Transportasi Darat	1 Layanan	22.300.000		
79	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	85.975.000		
80	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	34.910.000		
81	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pengukuran Frekuensi Dalam Kota	1 Layanan	4.970.000		
82	Balmon Kelas I Pekanbaru - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika luar kota Transportasi Laut	1 Layanan	34.910.000		
83	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.410.000		
84	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.300.000		
85	Balmon Kelas I Pekanbaru - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	34.910.000		
86	Balmon Kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.616.000		
87	Balmon Kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.925.000		
88	Balmon Kelas I Palembang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Lewat Sungai/Laut	1 Layanan	21.175.000		
89	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penertiban Frekuensi Radio dan Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	18.440.000		
90	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	62.082.000		
91	Balai Monitor Kelas I Palembang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000		
92	Balai Monitor Kelas I Palembang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.575.000		
93	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.675.000		
94	Balai Monitor Kelas I Palembang - Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	20.925.000		
95	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	4.952.000		

AN.

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
96	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	11.702.000	
97	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	18.883.000	
98	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	38.436.000	
99	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Pengukuran Frekuensi Radio (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	13.919.000	
100	Balai Monitor Kelas I Yogyakarta - Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Yogyakarta	1 Layanan	15.553.000	
101	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.900.000	
102	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.150.000	
103	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.200.000	
104	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	67.940.000	
105	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.150.000	
106	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	28.850.000	
107	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.900.000	
108	Balai Monitor Kelas I Denpasar - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.790.000	
109	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	7.462.000	
110	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	27.750.000	
111	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	45.710.000	
112	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Kupang	1 Layanan	25.140.000	
113	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	37.515.000	
114	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	58.450.000	
115	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.625.000	
116	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.500.000	
117	Balai Monitor Kelas I Kupang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	45.910.000	
118	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.675.000	
119	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	26.500.000	
120	Balai Monitor Kelas I Kupang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	45.910.000	
121	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	3.020.000	
122	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Darat	1 Layanan	21.876.000	
123	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Udara Kepulauan	1 Layanan	31.564.000	
124	Balai Monitor Kelas I Manado - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Sulut Transportasi Laut Kepulauan	1 Layanan	25.764.000	
125	Balai Monitor Kelas I Manado - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Sulut	1 Layanan	17.616.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
126	Balai Monitor Kelas I Manado - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Pos dan Informatika Luar Kota Sulut	1 Layanan	67.116.000	
127	Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Sulut	1 Layanan	5.370.000	
128	Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulut Transportasi Darat	1 Layanan	21.870.000	
129	Balai Monitor Kelas I Manado - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Sulut	1 Layanan	31.564.000	
130	Balai Monitor Kelas I Manado - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Sulawesi Utara	1 Layanan	22.086.000	
131	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	8.280.000	
132	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	34.175.000	
133	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	68.826.000	
134	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	68.326.000	
135	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	22.880.000	
136	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Papua)	1 Layanan	187.486.000	
137	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	8.280.000	
138	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota (Papua)	1 Layanan	60.326.000	
139	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Dengan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	40.940.000	
140	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	8.161.000	
141	Balai Monitor Kelas II Jayapura - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	39.326.000	
142	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.607.000	
143	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.970.000	
144	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Di Luar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut (Aceh)	1 Layanan	23.622.000	
145	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	26.390.000	
146	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	56.889.000	
147	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.607.000	
148	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.062.000	
149	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh) Dengan Menggunakan Transportasi Laut	1 Layanan	23.407.000	
150	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Didalam Kota	1 Layanan	4.615.000	
151	Balai Monitor Kelas II Banda Aceh - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	22.612.000	
152	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.512.000	
153	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.948.000	
154	Balai Monitor Kelas II Batam - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	43.873.000	
155	Balai Monitor Kelas II Batam - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	29.938.000	

AN



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
156	Balai Monitor Kelas II Batam - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	69.940.000	
157	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.583.000	
158	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	20.546.000	
159	Balai Monitor Kelas II Batam - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	39.009.000	
160	Balai Monitor Kelas II Batam - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.449.000	
161	Balai Monitor Kelas II Batam - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	25.336.000	
162	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.585.000	
163	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.070.000	
164	Balai Monitor Kelas II Padang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Layanan	47.600.000	
165	Balai Monitor Kelas II Padang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.735.000	
166	Balai Monitor Kelas II Padang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	40.745.000	
167	Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.020.000	
168	Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.770.000	
169	Balai Monitor Kelas II Padang - Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	1 Layanan	47.600.000	
170	Balai Monitor Kelas II Padang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.630.000	
171	Balai Monitor Kelas II Padang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.770.000	
172	Balai Monitor Kelas II Jambi - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.650.000	
173	Balai Monitor Kelas II Jambi - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.650.000	
174	Balai Monitor Kelas II Jambi - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	15.170.000	
175	Balai Monitor Kelas II Jambi - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	44.420.000	
176	Balai Monitor Kelas II Jambi - Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	21.900.000	
177	Balai Monitor Kelas II Jambi - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	21.650.000	
178	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.650.000	
179	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	19.000.000	
180	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu	1 Layanan	25.385.000	
181	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	14.080.000	
182	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	43.650.000	
183	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.650.000	
184	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	19.350.000	
185	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.750.000	
186	Balai Monitor Kelas II Bengkulu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	19.500.000	
187	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.570.000	

AN

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
188	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	18.920.000		
189	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.310.000		
190	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	28.980.000		
191	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.280.000		
192	Balai Monitor Kelas II Lampung - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.920.000		
193	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.280.000		
194	Balai Monitor Kelas II Lampung - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.205.000		
195	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000		
196	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000		
197	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000		
198	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	24.495.000		
199	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	62.265.000		
200	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	56.105.000		
201	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.560.000		
202	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	20.660.000		
203	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.545.000		
204	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000		
205	Balai Monitor Kelas II Pontianak - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.660.000		
206	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.375.000		
207	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	22.800.000		
208	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	14.250.000		
209	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	41.265.000		
210	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	22.800.000		
211	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.375.000		
212	Balai Monitor Kelas II Banjarmasin - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.800.000		
213	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	3.526.000		
214	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	21.650.000		
215	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	10.502.000		
216	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	45.750.000		
217	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.382.000		
218	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.650.000		
219	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.265.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
220	Balai Monitor Kelas II Palangkaraya - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.550.000		
221	Balai Monitoring Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.186.000		
222	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	23.635.000		
223	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Penyebrangan Air/Laut	1 Layanan	25.068.000		
224	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Laut di Gili/Kepulauan	1 Layanan	15.511.000		
225	Balmon Kelas II Mataram - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	39.202.000		
226	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	19.960.000		
227	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	60.440.000		
228	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	85.424.000		
229	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.383.000		
230	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Darat	1 Layanan	23.635.000		
231	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Penyebrangan Air/Laut	1 Layanan	25.068.000		
232	Balmon Kelas II Mataram - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	38.460.000		
233	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	6.363.000		
234	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB)	1 Layanan	25.068.000		
235	Balmon Kelas II Mataram - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (NTB) Transportasi Udara	1 Layanan	39.060.000		
236	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.805.000		
237	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.298.000		
238	Balmon Kelas II Palu - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	31.398.000		
239	Balmon Kelas II Palu - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	73.439.000		
240	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.540.000		
241	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	25.298.000		
242	Balmon Kelas II Palu - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	31.398.000		
243	Balmon Kelas II Palu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.871.000		
244	Balmon Kelas II Palu - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	25.096.000		
245	Lokmen Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000		
246	Lokmen Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Melalui Transportasi Darat	1 Layanan	23.150.000		
247	Lokmen Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	24.950.000		
248	Lokmen Kendari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	37.330.000		
249	Lokmen Kendari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	33.750.000		
250	Lokmen Kendari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	52.080.000		
251	Lokmen Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.400.000		
252	Lokmen Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	23.150.000		
253	Lokmen Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.550.000		

AL

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
254	Lokmen Kendari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	35.330.000		
255	Lokmen Kendari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.400.000		
256	Lokmen Kendari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.150.000		
257	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.975.000		
258	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	55.130.000		
259	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Jarak Jauh	1 Layanan	43.180.000		
260	Balmon Kelas II Merauke - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Jarak Dekat	1 Layanan	26.874.000		
261	Balmon Kelas II Merauke - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	40.520.000		
262	Balmon Kelas II Merauke - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	98.845.000		
263	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.125.000		
264	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	55.330.000		
265	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Jarak Jauh	1 Layanan	43.180.000		
266	Balmon Kelas II Merauke - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Jarak Dekat	1 Layanan	26.874.000		
267	Balmon Kelas II Merauke - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.755.000		
268	Balmon Kelas II Merauke - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	53.330.000		
269	Lokmen Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.755.000		
270	Lokmen Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	37.800.000		
271	Lokmen Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	51.210.000		
272	Lokmen Manokwari - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	49.210.000		
273	Lokmen Manokwari - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	33.405.000		
274	Lokmen Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.755.000		
275	Lokmen Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi laut	1 Layanan	49.200.000		
276	Lokmen Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	37.800.000		
277	Lokmen Manokwari - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	51.210.000		
278	Lokmen Manokwari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.283.000		
279	Lokmen Manokwari - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	50.336.000		
280	Lokmen Mamuju - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.536.000		
281	Lokmen Mamuju - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000		
282	Lokmen Mamuju - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	23.978.000		
283	Lokmen Mamuju - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	65.775.000		
284	Lokmen Mamuju - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.536.000		
285	Lokmen Mamuju - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000		
286	Lokmen Mamuju - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.536.000		
287	Lokmen Mamuju - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	24.150.000		
288	Lokmen Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.570.000		

KK

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
289	Lokmen Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi laut	1 Layanan	27.258.000	
290	Lokmen Ambon - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	24.650.000	
291	Lokmen Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Ambon	1 Layanan	19.064.000	
292	Lokmen Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	29.513.000	
293	Lokmen Ambon - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	42.199.000	
294	Lokmen Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.570.000	
295	Lokmen Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	13.720.000	
296	Lokmen Ambon - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	24.380.000	
297	Lokmen Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.503.000	
298	Lokmen Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.152.000	
299	Lokmen Ambon - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	26.570.000	
300	Lokmen Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	6.808.000	
301	Lokmen Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.883.000	
302	Lokmen Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	31.860.000	
303	Lokmen Ternate - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Pulau Terluar	1 Layanan	46.075.000	
304	Lokmen Ternate - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	26.358.000	
305	Lokmen Ternate - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	65.500.000	
306	Lokmen Ternate - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	71.500.000	
307	Lokmen Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.298.000	
308	Lokmen Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	26.574.000	
309	Lokmen Ternate - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	31.860.000	
310	Lokmen Ternate - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
311	Lokmen Ternate - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.260.000	
312	Lokmen Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.466.000	
313	Lokmen Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	18.816.000	
314	Lokmen Pangkal Pinang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	26.400.000	
315	Lokmen Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.466.000	
316	Lokmen Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	18.816.000	
317	Lokmen Pangkal Pinang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	26.400.000	
318	Lokmen Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	8.440.000	
319	Lokmen Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat	1 Layanan	22.971.000	
320	Lokmen Pangkal Pinang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara/Laut	1 Layanan	26.400.000	
321	Lokmen Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.532.000	

K/



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
322	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	18.816.000		
323	Lokmon Pangkal Pinang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut	1 Layanan	26.400.000		
324	Lokmon Gorontalo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000		
325	Lokmon Gorontalo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	19.375.000		
326	Lokmon Gorontalo - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	22.045.000		
327	Lokmon Gorontalo - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	68.660.000		
328	Loka Gorontalo - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000		
329	Loka Gorontalo - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.375.000		
330	Lokmon Gorontalo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000		
331	Lokmon Gorontalo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.375.000		
332	Balmon Kelas I Tangerang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	4.890.000		
333	Balmon Kelas I Tangerang - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	20.180.000		
334	Balmon Kelas I Tangerang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota (Kota Tangerang, Tangerang Selatan)	1 Layanan	15.102.000		
335	Balmon Kelas I Tangerang - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	59.794.000		
336	Balmon Kelas I Tangerang - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.825.000		
337	Balmon Kelas I Tangerang - Pengukuran Frekuensi Dalam Kota (Kota Tangerang, Tangerang Selatan)	1 Layanan	5.030.000		
338	Balmon Kelas I Tangerang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.030.000		
339	Balmon Kelas I Tangerang - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.125.000		
340	Lokmon Tanjung Selo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000		
341	Lokmon Tanjung Selo - Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	1 Layanan	25.060.000		
342	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	29.500.000		
343	Lokmon Tanjung Selo - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	1 Layanan	23.200.000		
344	Lokmon Tanjung Selo Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota dengan Transportasi Darat	1 Layanan	55.824.000		
345	Lokmon Tanjung Selo - Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000		
346	Lokmon Tanjung Selo - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Darat	1 Layanan	25.060.000		
347	Lokmon Tanjung Selo - Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Laut	1 Layanan	29.500.000		
348	Lokmon Tanjung Selo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.300.000		
349	Lokmon Tanjung Selo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Darat	1 Layanan	25.510.000		
350	Lokmon Tanjung Selo - Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Laut	1 Layanan	29.900.000		
351	Lokmon Tanjung Selo Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota dengan Transportasi Laut	1 Layanan	65.524.000		
352	Balmon Kelas II Mataram - Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota NTB Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	61.352.000		

6K



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
	Perkara Hukum Badan Usaha			
	1 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di DKI Jakarta	1 Perkara	79.442.000	
	2 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandung	1 Perkara	100.998.000	
	3 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	1 Perkara	89.186.000	
	4 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Bogor	1 Perkara	89.186.000	
	5 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Semarang	1 Perkara	94.996.000	
	6 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Banyuwangi	1 Perkara	85.007.000	
	7 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	1 Perkara	85.007.000	
	8 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Yogyakarta	1 Perkara	100.721.000	
	9 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Surabaya	1 Perkara	102.032.000	
	10 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Kediri	1 Perkara	90.913.000	
	11 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Jember	1 Perkara	90.913.000	
	12 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	1 Perkara	97.576.000	
	13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Tenggara	1 Perkara	86.958.000	
	14 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Selatan	1 Perkara	86.958.000	
	15 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Medan	1 Perkara	94.111.000	
	16 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Toba Samosir	1 Perkara	86.223.000	
	17 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungbalai	1 Perkara	82.907.000	
	18 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Padang	1 Perkara	98.887.000	
	19 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Payakumbuh	1 Perkara	87.139.000	
	20 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Dharmasraya	1 Perkara	87.139.000	
	21 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	1 Perkara	100.613.000	
	22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Dumai	1 Perkara	88.429.000	
	23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Indragiri Hilir	1 Perkara	88.429.000	
	24 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jambi	1 Perkara	95.006.000	
	25 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Sungai Penuh	1 Perkara	84.367.000	
	26 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palembang	1 Perkara	95.327.000	
	27 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Lubuklinggau	1 Perkara	84.581.000	
	28 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandar Lampung	1 Perkara	90.423.000	
	29 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1 Perkara	81.777.000	
	30 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pontianak	1 Perkara	101.125.000	
	31 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sanggau	1 Perkara	88.109.000	
	32 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palangka Raya	1 Perkara	98.599.000	
	33 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Ketawangring Barat	1 Perkara	88.738.000	
	34 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banjarmasin	1 Perkara	93.131.000	
	35 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Perkara	82.981.000	
	36 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu	1 Perkara	82.981.000	
	37 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Samarinda	1 Perkara	139.077.000	
	38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Balikpapan	1 Perkara	116.881.000	
	39 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan	1 Perkara	116.881.000	
	40 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Manado	1 Perkara	95.604.000	
	41 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Perkara	84.421.000	

64

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	42 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Balai POM Pidu	1 Perikara	97.224.000		
	43 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Banggai	1 Perikara	85.636.000		
	44 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Makassar	1 Perikara	99.663.000		
	45 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Palopo	1 Perikara	87.456.000		
	46 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Kendari	1 Perikara	100.846.000		
	47 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Baubau	1 Perikara	88.450.000		
	48 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Ambon	1 Perikara	174.783.000		
	49 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Perikara	133.084.000		
	50 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Denpasar	1 Perikara	107.581.000		
	51 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Bulukwang	1 Perikara	94.438.000		
	52 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Mataram	1 Perikara	103.564.000		
	53 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Bima	1 Perikara	91.369.000		
	54 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Kupang	1 Perikara	104.080.000		
	55 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Ende	1 Perikara	89.465.000		
	56 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Manggarai Barat	1 Perikara	89.465.000		
	57 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jawa Tengah	1 Perikara	191.718.000		
	58 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Merak	1 Perikara	171.991.000		
	59 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Mimika	1 Perikara	158.884.000		
	60 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Bengkulu	1 Perikara	93.290.000		
	61 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka Rejang Lebong	1 Perikara	82.267.000		
	62 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Sukoharjo	1 Perikara	105.613.000		
	63 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai	1 Perikara	91.477.000		
	64 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Serang	1 Perikara	101.424.000		
	65 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Tangerang	1 Perikara	86.031.000		
	66 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Pangkal Pinang	1 Perikara	99.100.000		
	67 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	1 Perikara	87.384.000		
	68 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Gorontalo	1 Perikara	98.154.000		
	69 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Batam	1 Perikara	123.726.000		
	70 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	1 Perikara	104.569.000		
	71 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Manokwari	1 Perikara	178.180.000		
	72 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	1 Perikara	150.441.000		
	73 Perikara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Mamuju	1 Perikara	92.885.000		
	Pemantauan Produk				
	74 Rekomendasi Intelijen Yang Berkeabsahan	1 Laporan	68.390.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)		(dalam rupiah)		
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	Badan Narkotika Nasional			
	Penyidikan dan Pengujian Produk			
1	Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Produk	254.000	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
2	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	61.215.900	
3	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	23.782.976	
4	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	12.421.500	
5	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Boddaka	1 Orang	40.012.667	
6	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Boddaka	1 Orang	21.928.195	
7	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Boddaka	1 Orang	11.400.247	
8	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	24.638.250	
9	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	15.734.594	
10	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	8.476.000	
11	Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	15.430.250	
12	Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	7.816.900	
13	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	22.813.000	
14	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	13.601.394	
15	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	7.081.130	
16	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	38.293.750	
17	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	17.753.364	
18	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	11.687.400	

64

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
057.09	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
	<b>    Pelatihan Bidang Sosial</b>				
	1 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT Yang Dilatih Oleh UPT Balai Besar Jakarta di Balai	1 Orang	3.524.333		
	2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT Yang Dilatih Oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.748.200		
	3 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Balai	1 Orang	2.704.000		
	4 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.513.966		
	5 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Balai	1 Orang	2.506.333		
	6 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.535.000		
	7 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	4.590.333		
	8 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Balai	1 Orang	2.699.666		
	9 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.968.933		
	10 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.730.933		
	11 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Balai	1 Orang	3.672.833		
	12 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.092.500		
	13 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	4.674.766		
	14 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Balai	1 Orang	2.727.333		
	15 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.904.666		
	16 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.179.400		
	17 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Laut	1 Orang	5.039.466		
	18 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.291.333		
	19 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	6.291.333		
	20 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Balai	1 Orang	3.410.333		
	21 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.585.100		
	22 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.575.733		
	23 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Balai	1 Orang	3.100.666		
	24 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.917.066		
	25 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih Oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	4.750.366		

64

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	<b>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</b>			
	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>			
	1 Layanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Barat	1 Orang	929.434	
	2 Layanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Tengah	1 Orang	938.893	
	3 Layanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur	1 Orang	1.180.319	
	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>			
	1 Layanan Informasi Pesisir Irian dan Matahari	1 Layanan	354.404.000	
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</b>			
	1 Layanan informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah barat	1 Orang	1.200.120	
	2 Layanan informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah Tengah	1 Orang	1.243.310	
	3 Layanan informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah Timur	1 Orang	1.434.720	

64

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial (BIG) (003)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
003.01	Badan Informasi Geospasial (BIG)				
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
	1 Kurikulum Penjurusan JP Surveyor Pemetaan	1 NSPK	195.206.000		





Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)				idn:rupiah
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Uraian	Beasran	Keterangan
1	2	3	4	5
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir			
	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir			
	1 Hasil analisis penerapan peraturan bidang instalasi dan bahan nuklir	1 Rekomendasi Kebijakan	93.414.000	

11

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (OS7)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
OS7.01	Arsip Nasional				
	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi				
	1 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan SIKN dan JIKN	1 Rekomendasi Kebijakan	172.325.000		

*Kd.*

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
089.01	<b>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</b>				
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	1 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	414.813.000		
	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	414.813.000		
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	3 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	414.813.000		
	4 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	414.813.000		
	5 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	414.813.000		
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	414.813.000		
	7 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	414.813.000		
	8 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	414.813.000		
	9 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	1 Laporan	619.519.000		
	10 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	1 Laporan	429.372.000		
	11 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	229.712.000		
	12 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	229.712.000		
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	13 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	2.083.772.000		
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	14 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
	15 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
	16 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
	17 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
	18 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
	19 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
	20 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	986.992.000		
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	2.083.772.000		
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
	23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
	24 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
	25 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
	26 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
	27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
	28 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	986.992.000		
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	29 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	2.083.772.000		
	<b>Pengawasan Pembangunan</b>				
	30 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
	31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
	32 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		

66

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Norman	Keterangan	
1	2	3	4	5	
33	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
34	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
35	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
36	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	986.992.000		
37	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
38	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
39	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
40	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
42	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
43	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
44	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	986.992.000		
45	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
46	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
47	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
48	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
49	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
50	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	986.992.000		
51	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
52	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
53	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
54	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
55	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
56	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
57	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	986.992.000		
58	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
59	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
60	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
61	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
62	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
63	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	986.992.000		
64	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
65	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		

64

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
66	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
67	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
68	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
69	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
70	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	986.992.000		
71	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	2.083.772.000		
72	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
73	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
74	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
75	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
76	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
77	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	986.992.000		
78	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	2.083.772.000		
79	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
80	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
81	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
82	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
83	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	986.992.000		
84	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	2.083.772.000		
85	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	2.083.772.000		
86	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	2.083.772.000		
87	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
88	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
89	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
90	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
91	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
92	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
93	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	2.083.772.000		
94	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah <b>Pengawasan Pembangunan</b>	1 Laporan	2.083.772.000		
95	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
96	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
97	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	2.083.772.000		
98	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
99	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
100	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.902.056.000		
101	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.902.056.000		
102	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	2.083.772.000		
103	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
104	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
105	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
106	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
107	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
108	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.902.056.000		
109	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.147.708.000		
110	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
111	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
112	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
113	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
114	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	986.992.000		
115	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.902.056.000		
116	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.147.708.000		
117	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	2.083.772.000		
118	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
119	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
120	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	2.083.772.000		
121	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Listrik	1 Laporan	2.083.772.000		
122	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
123	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.902.056.000		
124	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	2.083.772.000		
125	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.147.708.000		
126	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
127	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
128	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
129	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.902.056.000		
130	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	2.083.772.000		

61



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
131	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
132	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	2.083.772.000		
133	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Komisidnas Ekstern	1 Laporan	2.083.772.000		
134	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	2.083.772.000		
135	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	1.902.056.000		
136	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
137	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
138	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	628.036.000		
139	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
140	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
141	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	628.036.000		
142	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Pengawasan Pembangunan	1 Laporan	2.083.772.000		
143	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	2.083.772.000		
144	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	1 Laporan	628.036.000		
145	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	1 Laporan	628.036.000		

4

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			
	Sertifikasi Profesi dan SDM			
	1 Sertifikasi Paralel	1 Orang	677.000	
	2 Sertifikasi Bimbingan Teknis	1 Orang	3.272.000	
	Sertifikasi Produk			
	3 Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri	1 Produk	10.191.000	
	4 Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri	1 Produk	20.799.000	
	5 Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri	1 Produk	1.760.000	
	6 Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri	1 Produk	3.808.000	

61

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemuda dan Olah Raga (092)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1. Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam Pelatihan SDM Industri dan Promosi Olahraga.	1 Orang	6.541.196	

66

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi Sertifikasi Profesi dan SDM			
	1 Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	1 Orang	1.438.200	

1.1

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
100.01	Komisi Yudisial RI				
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat				
	1. Investigasi Penanganan dugaan Pelanggaran Kode Etik	1 Laporan	74.450.000		
	2. Investigasi Pendalaman Kasus	1 Laporan	150.000.000		
	3. Penelusuran rekam jejak hakim dan CMA	1 Orang	50.000.000		
	4. Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Kode Standarisasi Profesi dan SDM	1 Laporan	350.000.000		
	5. Standarisasi Calon Hakim Agung/Ad Hoc di MA	1 Orang	92.246.000		

66

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana				
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
1	NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik	1 NSPK	400.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
2	NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat	1 NSPK	400.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
3	NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	1 NSPK	400.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
4	NSPK Bidang Dukungan Infrastruktur darurat	1 NSPK	400.000.000		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				
5	Pendampingan Pengelolaan Infrastruktur Darurat	1 Orang	8.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
6	NSPK Bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	1 NSPK	400.000.000		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				
7	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	1 Orang	8.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
8	NSPK Bidang Pengendalian Operasi	1 NSPK	400.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
9	NSPK Bidang Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	1 NSPK	400.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
10	NSPK Bidang Optimal Jaringan Logistik dan Peralatan	1 NSPK	400.000.000		
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
11	NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB	1 NSPK	400.000.000		

11



Kementerian Negara/Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (106)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 1 Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	131.880.000	

21

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
107.01	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)				
	<b>Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana</b>				
	1 Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara	1 Orang	5.047.000		
	2 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer	1 Orang	30.500.000		
	3 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer	1 Orang	26.200.000		
	4 Diklat Perencanaan Operasi SAR	1 Orang	18.470.000		
	5 Diklat SAR di Air	1 Orang	18.400.000		
	6 Diklat SAR di Bangunan Runtuh	1 Orang	20.400.000		
	7 Diklat Teknis Komunikasi SAR	1 Orang	15.625.000		
	8 Diklat Medical First Responder	1 Orang	17.162.000		
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</b>				
	9 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Air untuk Wilayah Barat (36 JP)	1 Orang	3.972.000		
	10 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Air untuk Wilayah Tengah (36 JP)	1 Orang	4.455.000		
	11 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Air untuk Wilayah Timur (36 JP)	1 Orang	5.236.000		
	12 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (36 JP)	1 Orang	3.972.000		
	13 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (36 JP)	1 Orang	4.455.000		
	14 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (36 JP)	1 Orang	5.236.000		
	15 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (36 JP)	1 Orang	3.972.000		
	16 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (36 JP)	1 Orang	4.455.000		
	17 Pelatihan Dasar Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (36 JP)	1 Orang	5.236.000		
	18 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Barat (36 JP)	1 Orang	3.972.000		
	19 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (36 JP)	1 Orang	4.455.000		
	20 Pelatihan Dasar Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Timur (36 JP)	1 Orang	5.236.000		
	21 Materi SAR yang diberikan kepada Anak Sekolah untuk Wilayah Barat	1 Orang	625.000		
	22 Materi SAR yang diberikan kepada Anak Sekolah untuk Wilayah Tengah	1 Orang	710.000		
	23 Materi SAR yang diberikan kepada Anak Sekolah untuk Wilayah Timur	1 Orang	838.000		
	24 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000		
	25 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.036.000		
	26 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.136.000		
	27 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000		
	28 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.036.000		
	29 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.136.000		
	30 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000		
	31 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.036.000		
	32 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.136.000		
	33 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.575.000		
	34 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.036.000		
	35 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.136.000		
	<b>Koordinasi</b>				
	36 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	102.715.000		
	37 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	112.228.000		
	38 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	124.723.000		
	39 Latihan SAR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	30.887.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Basarnas) [107]					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
40	Latihan SAR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	32.976.000		
41	Latihan SAR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	38.005.000		
42	Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	52.155.000		
43	Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	54.759.000		
44	Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	60.437.000		
45	Latihan SAR Beregu di Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	41.138.000		
46	Latihan SAR Beregu di Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	43.157.000		
47	Latihan SAR Beregu di Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	48.584.000		
48	Latihan SAR Beregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	72.187.000		
49	Latihan SAR Beregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	77.705.000		
50	Latihan SAR Beregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	83.100.000		
51	Latihan SAR Beregu di Bawah Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	109.907.000		
52	Latihan SAR Beregu di Bawah Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	115.255.000		
53	Latihan SAR Beregu di Bawah Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	122.507.000		
54	Latihan SAR Beregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	64.327.000		
55	Latihan SAR Beregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	67.228.000		
56	Latihan SAR Beregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	73.447.000		
57	Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	112.376.000		
58	Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	122.731.000		
59	Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	137.428.000		
60	Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	55.444.000		
61	Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	58.437.000		
62	Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	66.516.000		
63	Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	69.036.000		
64	Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	72.447.000		
65	Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	79.806.000		
66	Latihan SAR Satuan di Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	53.333.000		
67	Latihan SAR Satuan di Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	56.704.000		
68	Latihan SAR Satuan di Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	63.241.000		
69	Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	94.853.000		
70	Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	97.087.000		
71	Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	109.608.000		
72	Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	123.028.000		
73	Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	128.734.000		
74	Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	139.424.000		
75	Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	85.883.000		
76	Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	93.280.000		
77	Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	106.590.000		
<b>Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat</b>					
78	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	141.752.000		
79	Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	142.441.000		

61

Kementerian Negara/Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107)				(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	80 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	151.404.000	
	81 Siaga SAR Khusus Lebaran di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	43.921.000	
	82 Siaga SAR Khusus Lebaran di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	44.052.000	
	83 Siaga SAR Khusus Lebaran di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	46.111.000	
	84 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	80.844.000	
	85 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	81.191.000	
	86 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	86.423.000	
	87 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	27.474.000	
	88 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	27.629.000	
	89 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	28.893.000	

61

Kementerian Negara/Lembaga: Ombudsman Republik Indonesia (110)			(dalam rupiah)	
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
110.01	Ombudsman Republik Indonesia			
	<b>Facilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>			
	1 Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	1 Lembaga	51.700.000	

K/

Kementerian Negara/Lembaga: Sekretariat Kabinet (114)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Urair	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
114.01	Sekretariat Kabinet			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerimaan	1 Orang	2.720.800	

61

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia (116)					(dalam rupiah)
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	
116.01	Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia				
	Komunikasi Publik				
	1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	3.979.000		
	2 Program Buletin Berita	1 Layanan	885.000		
	3 Program Feature	1 Layanan	752.000		
	4 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.890.000		
	5 Program Produksi Komentar	1 Layanan	509.000		
	6 Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.655.000		
	7 Program Produksi Filler	1 Layanan	371.000		
	8 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	584.000		
	Komunikasi Publik				
	9 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	1.254.000		
	10 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Layanan	5.096.000		
	11 Program Produksi SPOT	1 Layanan	200.000		
	12 Program Produksi Buletin Berita	1 Layanan	903.000		
	13 Program Siaran Produksi Feature	1 Layanan	692.000		
	14 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Layanan	1.030.000		
	15 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.987.000		
	16 Program Produksi Majalah Udara	1 Layanan	964.000		
	17 Program Siaran Kuis	1 Layanan	420.000		
	18 Program Produksi Sandiwara Radio	1 Layanan	1.883.000		
	19 Program Siaran Pengelaran	1 Layanan	15.030.000		
	20 Program Produksi Komentar	1 Layanan	473.000		
	21 Program Produksi Dokumenter	1 Layanan	1.495.000		
	22 Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.596.000		
	23 Program Siaran Obrolan	1 Layanan	483.000		
	24 Program Produksi Filler	1 Layanan	341.000		
	25 Program Produksi Report On The Spot (ROS)	1 Layanan	84.000		
	26 Program Siaran Pendekatan Development Broadcasting Unit (DBU)	1 Layanan	3.110.000		
	27 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	604.000		
	Komunikasi Publik				
	28 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	4.801.000		
	29 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Layanan	6.393.000		
	30 Program Produksi SPOT	1 Layanan	529.000		
	31 Produksi Buletin Berita	1 Layanan	902.000		
	32 Produksi Feature	1 Layanan	691.000		
	33 Produksi Laporan Mendalam	1 Layanan	1.016.000		
	34 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.966.000		
	35 Produksi Majalah Udara	1 Layanan	965.000		
	36 Siaran Kuis	1 Layanan	420.000		
	37 Program Produksi Komentar	1 Layanan	967.000		
	38 Produksi Dokumenter	1 Layanan	1.494.000		
	39 Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.539.000		
	40 Siaran Obrolan	1 Layanan	483.000		
	41 Program Produksi Filler	1 Layanan	345.000		
	42 Produksi Report On The Spot (ROS)	1 Layanan	83.000		
	43 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	606.000		
	44 Siaran Adlibis	1 Layanan	152.000		
	45 Siaran Pendekatan Development Broadcasting Unit (DBU)	1 Layanan	5.217.000		

61



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Kesamanan Laut (119)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
119.01	Badan Kesamanan Laut			
	Operasi Bidang Kesamanan			
	1 Operasi Utama Maritim	1 Operasi	5.762.552.000	
	Operasi Bidang Kesamanan			
	2 Petrol Mandiri	1 Hari Operasi	4.026.229.000	

hk

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (123)				
(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
123.01	Sekretariat Jenderal			
	<b>Pelayanan Publik kepada Masyarakat</b>			
	1 Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban	1 Orang	34.885.000	
	2 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisasi	1 Orang	59.770.000	
	3 Layanan Pemenuhan Hak Saksi Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	1 Orang	57.632.000	
	4 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat	1 Orang	59.644.000	
	5 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana TPPU	1 Orang	58.720.000	
	6 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana penyiksaan	1 Orang	58.730.000	
	7 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana umum lainnya	1 Orang	57.190.000	
	8 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1 Orang	57.790.000	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

  
SRI MULYANI INDRAWATI

hL